



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

Triwulan I

2025

BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Balai Besar Pengujian Penerapan
Produk Kelautan dan Perikanan
**Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Menghormati Hak dan Kepentingan Masyarakat, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) BBP3KP triwulan I tahun 2025 ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan LKj ini adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja BBP3KP kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. Selain itu, penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP3KP.

Landasan penyusunan LKj BBP3KP triwulan I tahun 2025 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BBP3KP serta mendukung salah satu sasaran program Ditjen PDSPKP yaitu Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Kegiatan utama BBP3KP yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP yaitu (a) Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (%) dengan capaian sebesar 88,3%, atau setara dengan 126,14% terhadap target tahun 2025 yakni 70%, (b) Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (%) dengan capaian 6,17%, atau setara dengan 8,81% terhadap target tahun 2025 yakni 70%, (c) Persentase Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis (%) dengan capaian 25%, atau setara dengan 25% terhadap target tahun 2025 yakni 100%, (d) Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (%) dengan capaian 8%, atau setara dengan 32% terhadap target tahun 2025 yakni 25%, dan (e) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP (%) dengan capaian 100%, atau setara dengan 105,26% terhadap target tahun 2025 yakni 95%. Nilai capaian organisasi BBP3KP periode triwulan I tahun 2025 sebesar 105,49% (kategori baik).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan Setjen KKP dan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP yang telah membimbing penyusunan LKj serta kepada tim pelaksana kegiatan dan segenap keluarga besar BBP3KP yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan di lingkungan BBP3KP dengan penuh tanggung jawab.

Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan BBP3KP di waktu yang akan datang. Saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya.

Jakarta, 21 April 2025
Kepala BBP3KP



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Kepala BBP3KP

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan BBP3KP

KONTRIBUTOR

Tim penguatan akuntabilitas kinerja lingkup BBP3KP,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
IKHTISAR EKSEKUTIF	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
1.5. PERMASALAHAN UTAMA.....	4
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. RENCANA STRATEGIS	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. CAPAIAN KINERJA	13
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	15
IK 1. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	16
IK 2. Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen).....	20
IK 3. Persentase Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis (Persen)	26
IK 4. Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen).....	30
IK 5. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diujiterapkan (Persen).....	37
IK 6. Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar (Persen)	44
IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP (Persen)	54

IK 8. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan BBP3KP (Persen).....	55
IK 9. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan BBP3KP (Nilai).....	57
IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	59
IK 11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	63
IK 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai) ..	66
IK 13. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BBP3KP (Indeks)	67
IK 14. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	69
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	71
3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	71
BAB IV PENUTUP.....	73
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBP3KP Tahun 2025.....	11
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2025.....	13
Tabel 3. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen).....	17
Tabel 4. Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen).....	22
Tabel 5. Pencapaian indikator persentase bahan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis	28
Tabel 6. Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen).....	32
Tabel 7. Pencapaian indikator persentase produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang diujiterapkan (Persen)	39
Tabel 8. Pencapaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar	45
Tabel 9. Rencana substansi webinar	50
Tabel 10. Pencapaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP	54
Tabel 11. Pencapaian Indikator persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan BBP3KP	56
Tabel 12. Pencapaian indikator nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BBP3KP	58
Tabel 13. Pencapaian indikator nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP	60
Tabel 14. Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP	65
Tabel 15. Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP	67
Tabel 16. Pencapaian indikator indeks profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	68
Tabel 17. Pencapaian indikator inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja BBP3KP.....	70
Tabel 18. Realisasi Anggaran BBP3KP per Output Kegiatan	72
Tabel 19. Permasalahan dan rekomendasi periode triwulan I tahun 2025	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BBP3KP.....	3
Gambar 2. Pegawai BBP3KP per Akhir Maret Tahun 2025	4
Gambar 3. NPSS BBP3KP pada Aplikasi SAPK triwulan I tahun 2025	13
Gambar 4. (a) Sasaran mutu tahun 2025 dan (b) Zoom Meeting bersama PIC KAN	18
Gambar 5. Perencanaan kegiatan pemeliharaan panelis standar	18
Gambar 6. Produk udang berlapis tepung dan filet patin beku	18
Gambar 7. Rapat rencana kegiatan verifikasi metode uji sensori/organoleptik	19
Gambar 8. Rapat rencana kegiatan pembuatan bahan acuan dan Uji ART (Accelerated Rate Test).....	19
Gambar 9. (a) Rapat rencana kegiatan pemeliharaan sistem manajemen mutu PBA dan (b) Progres pengajuan akreditasi PBA BBP3KP	19
Gambar 10. Proses reakreditasi sedang dalam tahap audit dokumen dan rekaman	19
Gambar 11. Pengujian sensori tuna kaleng	20
Gambar 12. Verifikasi metode pengujian Staphylococcus aureus	20
Gambar 13. Melengkapi ketidaksesuaian audit dokumen	20
Gambar 14. Evaluasi resertifikasi produk tuna dalam kemasan kaleng PT Sinar Pure Foods International.....	23
Gambar 15. Surveilans produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng PT Artha Sumatera Abad	23
Gambar 16. Rapat keputusan sertifikasi	23
Gambar 17. Rapat koordinasi persiapan kegiatan Tim Kerja Penilaian Kesesuaian Produk KP tahun 2025.....	24
Gambar 18. Rapat pembahasan inovasi layanan digital lingkup BBP3KP	24
Gambar 19. Kegiatan rapat pembahasan survailen wajib	25
Gambar 20. produk sarden dan makarel.....	25
Gambar 21. Rapat tinjauan hasil evaluasi sertifikasi	25
Gambar 22. Pelaksanaan Seri Webinar bertajuk SNI Didapat, UMKM Hebat di BBP3KP	26
Gambar 23. Kegiatan Refreshment bagi Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan	29
Gambar 24. Kegiatan penyiapan Bahan RSNI	29
Gambar 25. Kegiatan penyusunan konsep RSNI Produk Perikanan	29
Gambar 26. Dokumentasi sampel agar-agar kertas	29
Gambar 27. Peliputan dan konten media sosial terkait pelatihan fillet ikan nila dan lele.....	32

Gambar 28. Peliputan dan penyusunan konten media sosial terkait workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi mie dan kue glundung fortifikasi HPI	33
Gambar 29. Penyebarluasan informasi pada bazar produk perikanan dan kuliner bulan Januari.....	33
Gambar 30. Pengambilan gambar konten menu ramadhan berbahan dasar ikan dan rumput laut, tilapia, dan pilot test enzim protease Hidrolisat Protein Ikan (HPI)	34
Gambar 31. Contoh konten media sosial	34
Gambar 32. Penyebarluasan informasi pada bazar produk perikanan dan kuliner bulan Februari	34
Gambar 33. Kegiatan tim pengelola perpustakaan BBP3KP	35
Gambar 34. Peliputan atau pengambilan gambar dalam rangka penyusunan bahan informasi	35
Gambar 35. Contoh Konten Media Sosial Maret 2025	35
Gambar 36. Webinar Series SNI Produk Perikanan: “SNI Didapat, UMKM Hebat”	35
Gambar 37. Penyebarluasan Informasi melalui Kampanye Protein Ikan.....	36
Gambar 38. Tampilan SKM Digital pada LED Banner.....	36
Gambar 39. Kegiatan tim pengelola perpustakaan BBP3KP	36
Gambar 40. Sosialisasi kegiatan pendampingan penerapan pengembangan produk kelautan dan perikanan.....	39
Gambar 41. Workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan.....	40
Gambar 42. Rapat persiapan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah tahun 2025.....	40
Gambar 43. Verifikasi data, penilaian komitmen dan rencana pengembangan produk UMKM calon peserta Pendampingan Penerapan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025	41
Gambar 44. Kegiatan Pilot Test Enzim Protease Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI)	41
Gambar 45. Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	41
Gambar 46. Promosi Kuliner Ikan Hias Daerah Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan	42
Gambar 47. Pelatihan Diversifikasi Pelatihan Olahan Hasil Kelautan Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bekasi.....	42
Gambar 48. Rapat Pilot Test Enzim Protease Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI)	42
Gambar 49. Pengolahan produk perikanan untuk konten media sosial bekerjasama dengan Tim Humas PDSPKP dengan tema “Peluang usaha bisnis produk KP di bulan Ramadhan”	43

Gambar 50. Kegiatan Pilot Test Enzim Protease Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI)	43
Gambar 51. Kunjungan ASPRINDO ke BBP3KP	43
Gambar 52. Profiling kebutuhan pendampingan bagi 14 mitra UMKM Satker BBP3KP Palabuhanratu	46
Gambar 53. Pendampingan UMKM Mina Terampil	46
Gambar 54. Pendampingan pengembangan usaha UMKM Sari Rasa.....	46
Gambar 55. Kunjungan Poklahsar Nusa Telu dan Poklahsar Mahina Hena Lima	46
Gambar 56. Fasilitasi label dan bahan promosi UMKM Kaisar Arkarna	47
Gambar 57. Identifikasi UMKM Poklahsar Mahina Solemata.....	47
Gambar 58. Workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi pilus ikan nila	47
Gambar 59. workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi gohyong ikan tuna	48
Gambar 60. Fasilitasi dokumen perizinan UMKM Dua Karunia	48
Gambar 61. Kolaborasi Satker BBP3KP Palabuhanratu dengan SMK Bhayangkara	48
Gambar 62. Diversifikasi produk olahan berbahan dasar ikan kepada PAUD TPA Doa Bangsa	48
Gambar 63. Identifikasi dan verifikasi perizinan UMKM Mutiara Laut.....	49
Gambar 64. Identifikasi dan verifikasi produk abon Kelompok Usaha Koperasi Ina Mandiri	49
Gambar 65. Identifikasi Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyun	49
Gambar 66. Fasilitasi legalitas NIB Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyung ..	50
Gambar 67. Koordinasi dengan Poklahsar Mina Terampil	50
Gambar 68. Workshop “Ngolah Ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa”	51
Gambar 69. Survei lokasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan.....	51
Gambar 70. Fasilitasi penertiban P-IRT bagi Poklahsar Mutiara Laut	51
Gambar 71. Fasilitasi bahan promosi kepada UMKM Sari Rasa dan UMKM Bunda Aska ...	51
Gambar 72. Fasilitasi pembuatan label untuk Poklahsar Harapan Star dan Putri Duyun	52
Gambar 73. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah.....	52
Gambar 74. Fasilitasi NIB dan SPP-PIRT untuk produk ikan asap Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyung	52
Gambar 75. Workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk rolade tuna...	53
Gambar 76. Fasilitasi pembuatan label UMKM IASI.....	53
Gambar 77. Identifikasi UMKM baru, Poklahsar Cumi	53
Gambar 78. Pelaksanaan morning briefing reformasi birokrasi bulan Januari	58
Gambar 79. Pelaksanaan morning briefing reformasi birokrasi bulan Februari.....	59

Gambar 80. Rapat PZI WBK/WBBM.....	59
Gambar 81. Pelaksanaan morning briefing reformasi birokrasi bulan Maret	59
Gambar 82. Pembahasan dokumen perencanaan kinerja	61
Gambar 83. Rapat pengisian evaluasi rencana aksi level 2 periode triwulan IV tahun 2024	61
Gambar 84. Pengisian evaluasi rencana aksi level 1 periode triwulan IV tahun 2024	61
Gambar 85. Pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun 2024	61
Gambar 86. Penyusunan draft lkj level 2 periode triwulan IV tahun 2024.....	62
Gambar 87. Pembahasan matriks cascading kinerja Ditjen PDSPKP 2025-2029.....	62
Gambar 88. Rekonsiliasi Data Capaian dan Pelaporan Kinerja Tahun 2024	62
Gambar 89. Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2024 Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP	62
Gambar 90. Esakip Reviu MenpanRB	63
Gambar 91. Penginputan perencanaan kinerja pada aplikasi SAPK	63
Gambar 92. Reformulasi IKPA 2025	64
Gambar 93. Komponen Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP.....	68
Gambar 94. Pelantikan dan pengambilan sumpah / janji Jabatan Fungsional	69
Gambar 95. rapat pembahasan IKU inovasi pelayanan publik	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan PK Level 2 BBP3KP Tahun 2025	75
Lampiran 2. Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian	76
Lampiran 3. Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen).....	80
Lampiran 4. Judul Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pembahasan bersama Komite Teknis 65-05 pada bulan Februari	81
Lampiran 5. Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	82

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) triwulan I tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) BBP3KP selama triwulan I tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) triwulan I tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP dan Rencana Strategis BBP3KP Tahun 2025-2029.

Capaian indikator kinerja BBP3KP pada triwulan I tahun 2025 telah tercapai keseluruhan, yaitu 5 indikator dari 5 indikator yang ditetapkan. Terdapat 1 indikator berpredikat istimewa yaitu persentase produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian dengan capaian 126,14%. Empat indikator berpredikat baik yaitu persentase produk yang mendapatkan sertifikat SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian dengan capaian 102,83%, persentase bahan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis dengan capaian 100%, dan persentase penerima layanan dan/atau manfaat dari kegiatan diseminasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan dengan capaian 100%. Secara rata-rata capaian realisasi indikator kinerja BBP3KP berpredikat Istimewa dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang ditunjukkan dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id adalah 105,71%.

Perjanjian kinerja antara Kepala BBP3KP dengan Direktur Jenderal PDSPKP yang telah ditetapkan untuk dicapai tahun 2025 terdiri atas 2 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja BBP3KP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dari 14 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dihitung per triwulan yaitu: (1) Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian, (2) Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, (3) Persentase Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis, (4) Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, (5) Persentase Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diujiterapkan, (6) Persentase Pelaku

Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar dan (7) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP.

2. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dihitung secara semesteran yaitu: (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan BBP3KP dan (2) Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP.
3. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang pencapaiannya baru dapat dihitung pada akhir tahun, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan BBP3KP, (2) Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan BBP3KP, (3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BBP3KP, (4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP, dan (5) Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP.

Tahun 2025 pagu anggaran BBP3KP adalah sebesar Rp42.613.397.000, sementara pagu terblokir sebesar Rp12.077.393.000,00. Realisasi anggaran periode triwulan I tahun 2025 sebesar Rp6.472.689.251,00 atau setara dengan 15,19%.

Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing indikator kinerja pada periode triwulan I tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada *outcome*. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas disini diartikan sebagai perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tahapan penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Penyusunan Rencana Strategis, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pengelolaan Kinerja, (5) Pelaporan Kinerja dan (6) Review dan Evaluasi Kinerja.

Pelaporan Kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menyusun Laporan Kinerja BBP3KP triwulan I tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode triwulan I tahun 2025.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BBP3KP periode triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas kinerja yang telah dicapai oleh Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan selama periode triwulan I tahun 2025.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP3KP.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keberadaan BBP3KP didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.

BBP3KP memiliki tugas pokok melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

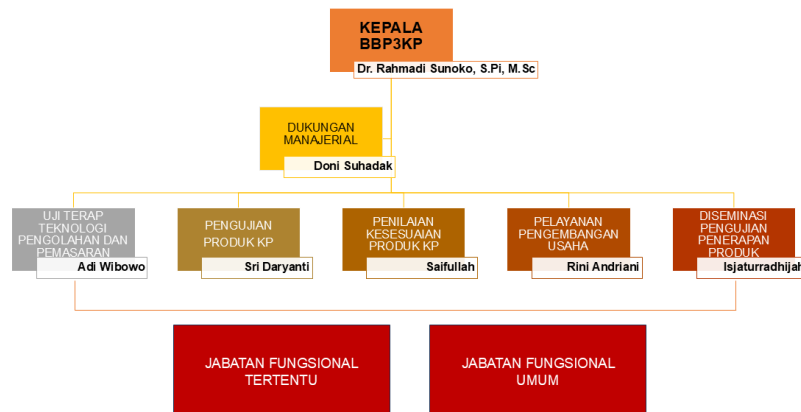
- a) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b) Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c) Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- e) Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia hasil perikanan;
- f) Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g) Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan;
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BBP3KP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Subbag Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi BBP3KP diatur seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBP3KP

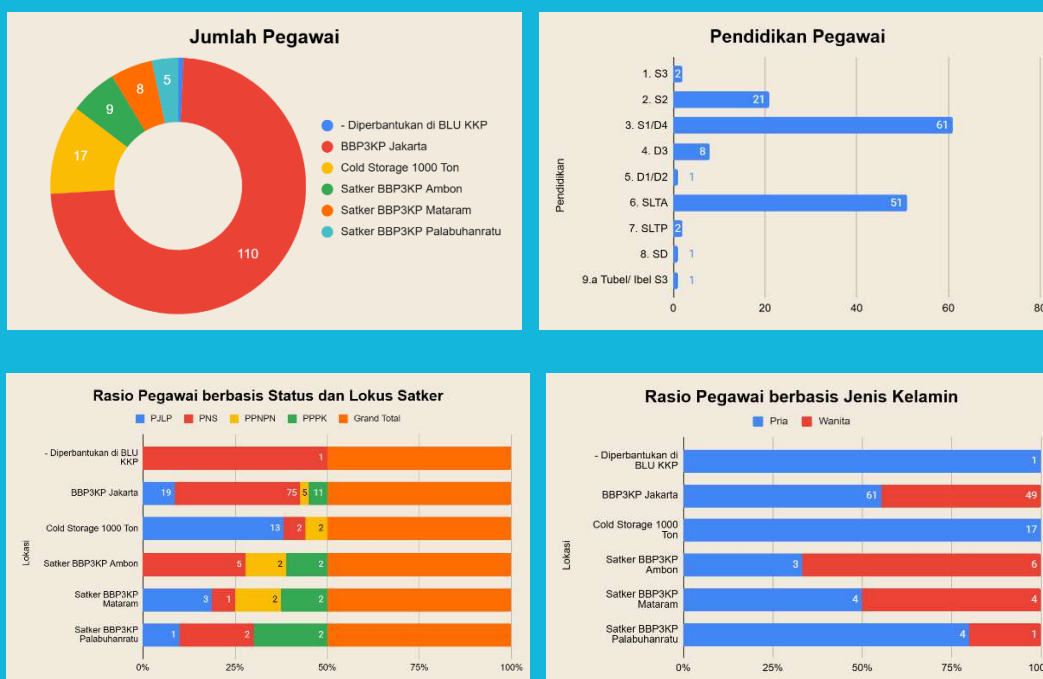
BBP3KP dibentuk 3 satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja, yang berlokasi di Palabuhanratu, Mataram, dan Ambon. Ketiga satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pelayanan pengembangan usaha produk kelautan dan perikanan, yang dipimpin oleh pengelola satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

1.4. KERAGAAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada triwulan I tahun 2025, jumlah pegawai BBP3KP per akhir Maret tahun 2025 adalah sebanyak 150 orang, dapat dilihat pada Gambar 2.

KEPEGAWAIAN

150 PEGAWAI



Gambar 2. Pegawai BBP3KP per Akhir Maret Tahun 2025

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Ke depan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan

pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar.

Tantangan lainnya pada industri perikanan Indonesia adalah masalah keamanan pangan, dimana kontaminasi oleh bakteri patogen seperti *Salmonella*, *Listeria*, dan *Vibrio* dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kontaminasi ini bisa terjadi sepanjang rantai pasok, mulai dari lingkungan alam, selama proses penangkapan, hingga tahap pengolahan dan distribusi. Di samping itu, munculnya produk substitusi berbasis sel dan tumbuhan juga menjadi tantangan baru bagi industri perikanan tradisional. Produk-produk ini semakin dilirik karena dianggap lebih berkelanjutan dan etis, mengingat proses produksinya tidak melibatkan penangkapan ikan dan dapat dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Walaupun saat ini produk substitusi tersebut masih dalam tahap pengembangan, potensi pertumbuhannya sangat besar dan bisa menjadi pesaing serius bagi produk perikanan konvensional di masa depan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, sektor kelautan dan perikanan Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri perikanan global, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi rumput laut, tuna, dan komoditas perikanan lainnya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

Sehubungan dengan berbagai isu strategis tersebut, BBP3KP menetapkan sasaran dan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PDSPKP dan Kepala BBP3KP.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja BBP3KP periode triwulan I tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja BBP3KP selama periode triwulan I tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) periode triwulan I tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LKj BBP3KP

mengacu pada
Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun
2014

Bab I Pendahuluan, Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja BBP3KP periode triwulan I tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja BBP3KP periode triwulan I tahun 2025 dan analisisnya.

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BBP3KP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, menyajikan Perjanjian Kinerja dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan merumuskan tujuan pembangunan selama lima tahun: Meningkatnya produk KP yang memenuhi standar pengujian. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan persentase produk yang memenuhi persyaratan standar pengujian, dari 70% pada tahun 2025 menjadi 90% pada tahun 2029.

2.1.1 SASARAN STRATEGIS

Sasaran kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BBP3KP sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan kegiatan dalam program nilai tambah dan daya saing industri serta program dukungan manajemen di Ditjen PDSPKP. Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Sasaran: Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Kelautan dan Perikanan yang Disediakan meningkat dari 7 produk pada tahun 2025 menjadi 11 produk pada tahun 2029.
 - b. Sasaran: Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya meningkat dari 162 produk pada tahun 2025 menjadi 380 produk pada tahun 2029.
 - c. Sasaran: Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji meningkat dari 250 produk pada tahun 2025 menjadi 1.300 produk pada tahun 2029.
 - d. Sasaran: Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Masyarakat yang Menerima Diseminasi dan

Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan meningkat dari 1.000 orang pada tahun 2025 menjadi 3.000 orang pada tahun 2029.

- e. Sasaran: Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan meningkat dari 12 produk pada tahun 2025 menjadi 35 produk pada tahun 2029.
- f. Sasaran: UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah pelaku usaha yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis meningkat dari 9 UMKM pada tahun 2025 menjadi 112 UMKM pada tahun 2029.
- g. Sasaran: Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk di Gudang Beku meningkat dari 15 Badan Usaha pada tahun 2025 menjadi 40 Badan Usaha pada tahun 2029.
- h. Sasaran: Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku meningkat dari 200 unit pada tahun 2025 menjadi 600 unit pada tahun 2029.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 92 pada tahun 2025 menjadi 92,2 pada tahun 2029;
- b. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 87 pada tahun 2025 menjadi 89 pada tahun 2029;
- c. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 86 pada tahun 2025 menjadi 86,8 pada tahun 2029;
- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 85 pada tahun 2025 menjadi 89 pada tahun 2029;
- e. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari <0,5% pada tahun 2025 menjadi <0,5% pada tahun 2029; dan

- f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Ditjen PDSPKP, meningkat dari 81,5 pada tahun 2025 menjadi 82,5 pada tahun 2029.

2.1.2 Kebijakan

Arah kebijakan Ditjen PDSPKP pada tahun 2025-2029, dinyatakan “Kebijakan PDSPKP: Mewujudkan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing di pasar domestik dan ekspor”. Kebijakan dan strategi tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang berbasis ekonomi biru, sehingga mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, serta juga sesuai dengan visi KKP 2025-2029.

Program dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 tersebut adalah:

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
 - Kegiatan PDSDKP-1: Prasarana dan Sarana hasil kelautan dan perikanan
 - Kegiatan PDSDKP-2: Investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan
 - Kegiatan PDSDKP-3: Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
 - Kegiatan PDSDKP-4: Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
 - Kegiatan PDSDKP-5: Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan
- b. Program Dukungan Manajemen. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2025-2029, yaitu:
 - Kegiatan PDSDKP-6: Dukungan Manajemen Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Sejak tahun 2013, perjanjian kinerja pada unit kerja lingkup BBP3KP telah didasarkan pada konsep manajemen kinerja berbasis BSC.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kegiatan yang diharapkan dicapai oleh BBP3KP pada tahun 2025 seperti tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja BBP3KP pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBP3KP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian	1	Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	70
		2	Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)	70
		3	Persentase Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis (Persen)	100
		4	Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	25
		5	Persentase Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diujiterapkan (Persen)	100
		6	Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar (Persen)	100
KEGIATAN 2. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP				
DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN				
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP (Persen)	95
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan BBP3KP (Persen)	100
		9	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	75

	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	86
	11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	92
	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	71,5
	13	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BBP3KP (Indeks)	87
	14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	1

BBP3KP mempunyai output kegiatan sesuai dokumen Rencana Kerja TA 2025 pada aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas sebagai berikut:

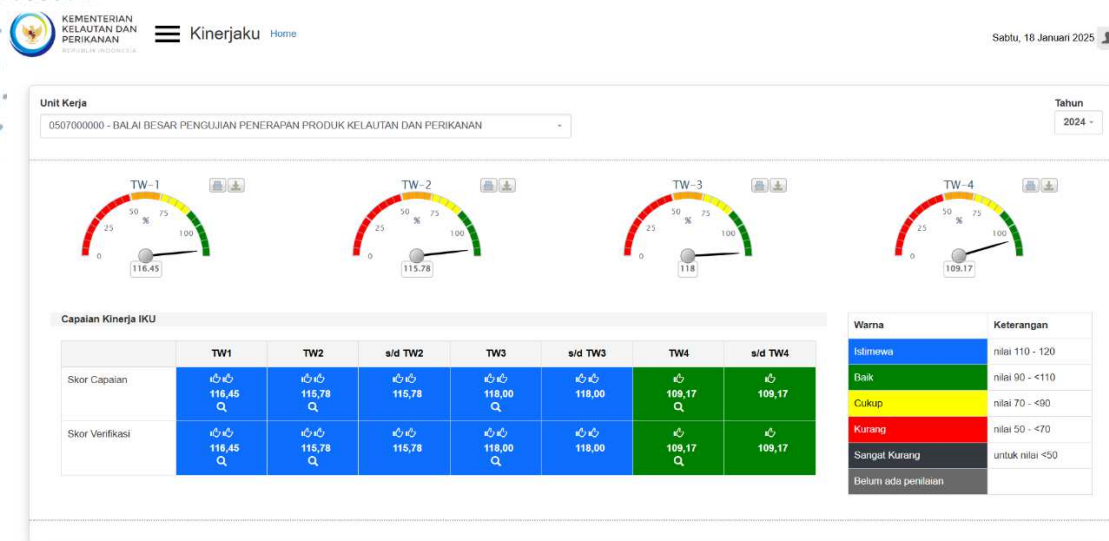
- 1) Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan, sebanyak 7 produk;
- 2) Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya, sebanyak 162 produk;
- 3) Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji, sebanyak 250 produk;
- 4) Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, sebanyak 1.000 orang;
- 5) Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan, sebanyak 12 produk;
- 6) UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis, sebanyak 9 UMKM;
- 7) Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk, sebanyak 15 badan usaha;
- 8) Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku, sebanyak 200 unit;
- 9) Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku, sebanyak 1 unit;
- 10) Layanan Umum, sebanyak 1 unit;
- 11) Layanan Perkantoran, sebanyak 1 unit;
- 12) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, sebanyak 1 layanan;
- 13) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, sebanyak 1 layanan; dan
- 14) Layanan Manajemen Keuangan, sebanyak 1 layanan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja triwulan I tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan BBP3KP dari bulan Januari sampai dengan Maret 2025. BBP3KP telah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Nilai rata-rata dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBP3KP sebesar 102,86% dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. NPSS BBP3KP pada Aplikasi SAPK triwulan I tahun 2025

Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala BBP3KP dengan Direktur Jenderal PDSPKP. Capaian masing-masing Indikator Kinerja pembentuk NPSS diuraikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW I 2025	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2025	TW I 2025		Tahun 2025	TW I 2025
1	Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	70	70	88,3	126,14	126,14

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW I 2025	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2025	TW I 2025		Tahun 2025	TW I 2025
2	Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)	70	6	6,17	8,81	102,83
3	Persentase Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis (Persen)	100	25	25	25	100
4	Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	25	8	8	32	100
5	Persentase Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diujiterapkan (Persen)	100	-	-	-	-
6	Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar (Persen)	100	-	-	-	-
7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP (Persen)	95	95	100	105,26	105,26
8	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan BBP3KP (Persen)	100	-	-	-	-
9	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	75	-	-	-	-

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW I 2025	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2025	TW I 2025		Tahun 2025	TW I 2025
10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	86	-	-	-	-
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	92	-	-	-	-
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	71,5	-	-	-	-
13	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BBP3KP (Indeks)	87	-	-	-	-
14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	1	-	-	-	-

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja BBP3KP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.2.1

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Meningkatkan Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja.

IK 1. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)

Produk perikanan secara umum perlu diuji nutrisi dan mutunya karena produk tersebut telah mengalami proses pengolahan dan pencampuran dengan bahan-bahan non ikan, seperti tepung dan bumbu-bumbu yang digunakan dalam proses pembuatannya. Dari sudut pandang konsumen, ketersediaan data nutrisi dan mutu memberi kesempatan bagi mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, dari sudut pandang produsen, ketersediaan data nutrisi dan mutu produk diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari produk tersebut.

Uji nutrisi dan mutu produk hasil perikanan telah dilaksanakan oleh BBP3KP sejak tahun 2010. Kegiatan ini meliputi pengujian contoh produk klien LS Pro-HP untuk proses sertifikasi, contoh produk perikanan sebagai data dukung penyusunan RSNI, contoh produk dari tenant binaan inkubasi bisnis, tenant binaan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, contoh produk eksternal dan contoh produk dari UPI/pasar/pelabuhan yang disampling oleh personil laboratorium yang ditugaskan. Selain itu, BBP3KP juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan Persyaratan Teknis Laboratorium Pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025.

Ketersediaan data uji diharapkan dapat membantu pelaku usaha pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Selain itu, hasil pengujian nutrisi dan mutu juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan Ditjen PDSPKP, misalnya dalam upaya percepatan penurunan stunting (anak kerdil) melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi.

Persentase produk yang memenuhi persyaratan standar pengujian merupakan persentase dari produk kelautan dan perikanan yang diuji di Laboratorium BBP3KP yang memenuhi standar pengujian dibandingkan dengan keseluruhan produk KP yang diuji pada tahun berjalan di Laboratorium BBP3KP.

Produk kelautan dan perikanan yang memenuhi standar pengujian adalah produk kelautan dan perikanan yang telah memiliki hasil uji yang memenuhi persyaratan standar (SNI, Perka BPOM, atau standar lainnya).

Produk yang diuji merupakan produk kelautan dan perikanan yang berasal dari pelaku usaha yang didampingi BBP3KP (tenant inbis dan uji terap), penyusunan bahan RSNI, sertifikasi produk, kurasi dalam rangka menuju UMKM naik kelas dan produk KP yang berasal dari sumber lainnya.

$$\%PPSE = \frac{\sum A_i}{\sum B_i} \times 100\%$$

%PPSE adalah Persentase Produk yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian. $\sum A_i$ adalah jumlah produk yang diuji dan memenuhi standar per triwulan. $\sum B_i$ adalah jumlah keseluruhan produk yang diuji per triwulan. Pada periode triwulan I tahun 2025, produk kelautan dan perikanan yang memenuhi standar pengujian sejumlah 53 produk dari 60 produk kelautan dan perikanan yang diuji.

Tabel 3. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)

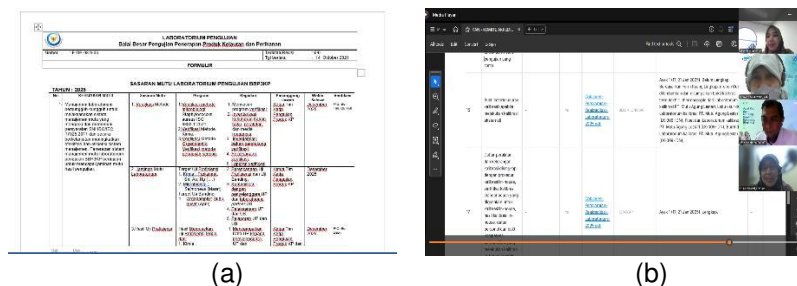
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	70	-	-	70	88,3	-	-	88,3	126,14	126,14	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, capaian persentase produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian adalah 88,3%. Capaian ini setara dengan 126,14% terhadap target triwulan I tahun 2025 yakni 70%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 70%, maka capaian triwulan I tahun 2025 telah mencapai 126,14%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya maupun capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

- 1) Pengujian yang dilaksanakan meliputi uji kimia, fisika, sensori, cemaran logam dan cemaran mikrobiologi.
- 2) Sampel yang diuji sejumlah 60 produk dengan data hasil pengujian produk sebanyak 181 data uji. Produk yang diuji tersebut berasal dari klien eksternal sebanyak 9 produk, berasal dari klien dan calon klien LSPro BBP3KP 19 produk, berasal dari kegiatan RSNI 7 produk, berasal dari Tim Kerja Pengujian 5 produk,

- berasal dari Tim Kerja UTTPP sebanyak 16 produk, berasal dari Ditjen Pengolahan 3 produk, dan berasal dari kegiatan Tim Kerja Pengujian 1 produk.
- 3) Seluruh produk yang diuji telah memiliki persyaratan mutu dan berdasarkan data hasil uji, 53 produk memenuhi persyaratan mutu, sementara 7 lainnya tidak memenuhi persyaratan mutu.
 - 4) Pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025:2017 dengan dilaksanakannya a) perencanaan kegiatan pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium pada 22 Januari 2025, dan b) pendaftaran reakreditasi dan mengunggah dokumen persyaratan reakreditasi melalui website KAN versi 2.2



Gambar 4. (a) Sasaran mutu tahun 2025 dan (b) Zoom Meeting bersama PIC KAN

- 5) Perencanaan kegiatan pemeliharaan panelis standar tanggal 22 Januari 2025.



Gambar 5. Perencanaan kegiatan pemeliharaan panelis standar

- 6) Pengujian sensori pada sampel pemeliharaan ruang lingkup untuk produk fillet patin dan udang berlapis tepung beku tanggal 31 Januari 2025.



Gambar 6. Produk udang berlapis tepung dan fillet patin beku

- 7) Perencanaan kegiatan verifikasi metode uji sensori/organoleptik. Pada tahun 2025 telah ditetapkan dua metode pengujian yang diverifikasi yaitu metode pengujian *Staphylococcus aureus* ISO 6888.1:2021 dan metode pengujian sensori/organoleptik.



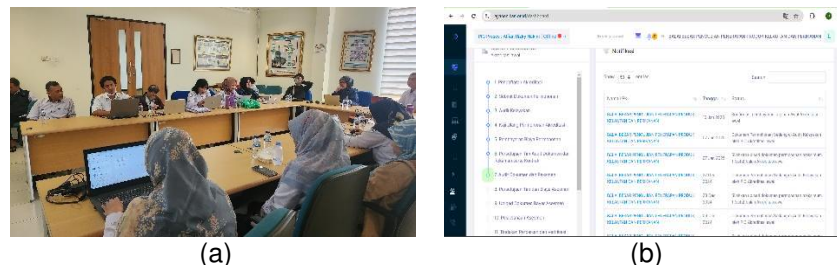
Gambar 7. Rapat rencana kegiatan verifikasi metode uji sensori/organoleptik

- 8) Perencanaan kegiatan pembuatan bahan acuan tanggal 22 Januari 2025, serta dilaksanakan uji ART (*Accelerated Rate Test*) dengan menggunakan 2 Bahan Acuan yang berasal dari batch 1 BA.AT.06.24 dan BA.AT.08.24.



Gambar 8. Rapat rencana kegiatan pembuatan bahan acuan dan Uji ART (*Accelerated Rate Test*)

- 9) Rapat pembahasan rencana kegiatan pemeliharaan sistem manajemen bahan acuan Produsen Bahan Acuan (PBA) dan pemantauan permohonan akreditasi PBA BBP3KP pada aplikasi KAN.

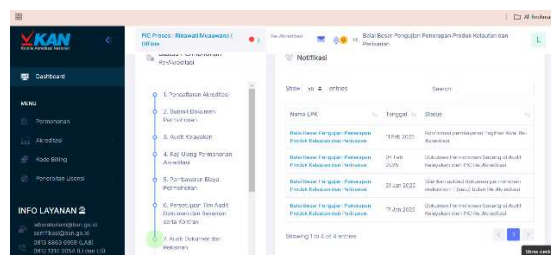


(a)

(b)

Gambar 9. (a) Rapat rencana kegiatan pemeliharaan sistem manajemen mutu PBA dan (b) Progres pengajuan akreditasi PBA BBP3KP

- 10) Kegiatan pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025:2017 berupa persiapan kegiatan reakreditasi dan pelaksanaan audit dokumen dan rekaman oleh KAN setelah dokumen persyaratan akreditasi yang sebelumnya telah diunggah dinyatakan memenuhi.



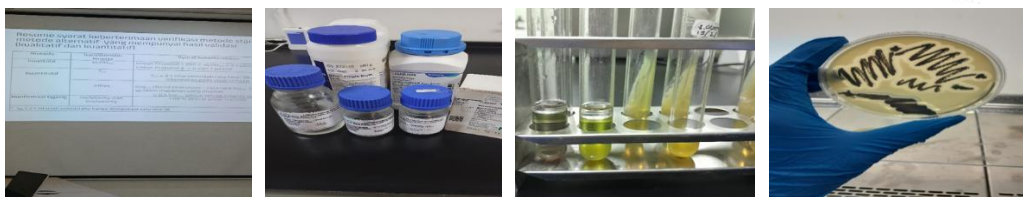
Gambar 10. Proses reakreditasi sedang dalam tahap audit dokumen dan rekaman

- 11) Pengujian sensori pada sampel pemeliharaan ruang lingkup yaitu tuna kaleng dalam rangka pemeliharaan panelis standar.



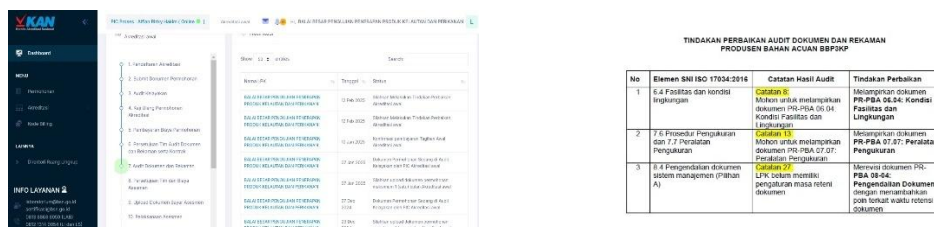
Gambar 11. Pengujian sensori tuna kaleng

- 12) Verifikasi metode pengujian *Staphylococcus aureus* ISO 6888.1:2021.



Gambar 12. Verifikasi metode pengujian *Staphylococcus aureus*

- 13) Rapat pembahasan dalam rangka verifikasi metode pengujian sensori/organoleptik sehubungan dengan adanya revisi SNI 2346:2015 Pedoman Pengujian Sensori pada Produk Perikanan.
- 14) Melengkapi ketidaksesuaian audit dokumen dan rekaman yang telah diunggah di website KAN versi 2.2 dalam rangka pemeliharaan sistem manajemen dan persyaratan teknis produsen bahan acuan SNI ISO/IEC 17034.



Gambar 13. Melengkapi ketidaksesuaian audit dokumen

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase produk kelautan dan perikanan yang memenuhi persyaratan standar pengujian sebesar Rp525.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp48.455.060,- atau setara dengan 9,23%.

IK 2. Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)

Standardisasi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing suatu produk. Umumnya standar dimanfaatkan konsumen sebagai acuan dalam memilih produk. Bagi produsen, standar berfungsi sebagai patokan dalam memproduksi produk yang

berkualitas dan dapat diterima pasar nasional maupun internasional. Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk perikanan yang beredar di pasar merupakan barang yang aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Pemberlakuan SNI secara wajib telah ditetapkan untuk dua produk hasil perikanan, yaitu SNI Sarden dan Makrel dalam kemasan kaleng dan SNI Tuna dalam kemasan kaleng. Pemberlakuan SNI secara wajib tersebut memerlukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk memastikan dan memberikan sertifikat bahwa produk telah sesuai dengan SNI. Ditjen PDSPKP melalui BBP3KP sebagai LSPro-HP memiliki peran yang penting dalam melakukan sertifikasi terhadap produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng dan tuna dalam kemasan kaleng.

Pemberian tanda SNI pada suatu produk dapat dilakukan apabila produk tersebut diproduksi oleh suatu unit pengolahan yang telah mendapat Sertifikat Kesesuaian, Sertifikat Kelayakan Pengolah, melakukan produksi secara kontinu, dan proses produksi serta produknya memenuhi persyaratan sesuai SNI. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LSPro-HP merupakan lembaga sertifikasi yang berada di BBP3KP yang bergerak pada sertifikasi produk pengolahan hasil perikanan. LSPro-HP ini sudah terakreditasi KAN. LSPro-HP BBP3KP juga ditunjuk sebagai LSPro yang menerbitkan SPPT SNI untuk produk tuna, sarden dan makrel dalam kemasan kaleng yang diberlakukan secara Wajib.

Proses sertifikasi produk terdiri dari pengajuan sertifikasi, evaluasi sesuai skema (pemeriksaan proses produksi dan pengambilan contoh, pengujian contoh, tindakan perbaikan), tinjauan hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penerbitan sertifikat. Selama masa berlaku sertifikat (4 tahun), LSPro-HP melakukan surveilan untuk memastikan bahwa proses produksi dan produk klien sertifikasi tetap sesuai dengan persyaratan SNI. Sistem manajemen lembaga sertifikasi produk (SNI ISO/IEC 17065) yang diterapkan harus dipelihara supaya selalu sesuai dengan persyaratan standarnya masing-masing. Pemeliharaan sistem ini dilakukan melalui antara lain audit internal, kaji ulang dokumen, kaji ulang manajemen dan rapat governing board.

Sasaran produk yang disertifikasi didasarkan pada ruang lingkup sertifikasi LSPro-HP yang telah diakreditasi oleh KAN per tanggal 6 Desember 2021 yaitu meliputi produk (1) baso ikan beku, (2) kerupuk ikan, (3) ikan asin kering, (4) bandeng presto, (5) bandeng cabut duri, (6) abon ikan, (7) sarden dan makarel dalam kemasan kaleng, (8) tuna dalam

kemasan kaleng, (9) naget ikan, (10) otak-otak ikan, (11) pempek ikan rebus beku, (12) siomay ikan, (13) amplang ikan, (14) ikan pindang, (15) surimi, (16) bandeng isi, (17) ikan renyah, (18) fillet patin beku, (19) udang beku, (20) kerupuk ikan/udang/moluska siap makan. Selain layanan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan, BBP3KP juga melakukan pemeliharaan sistem manajemen mutu LSPPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065.

Produk yang mendapatkan SPPT SNI dan atau Sertifikat Kesesuaian adalah perbandingan produk yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian ditambah dengan produk SNI Wajib dan Sukarela yang mempertahankan sertifikat dibandingkan dengan jumlah produk yang kelautan dan perikanan yang dinilai Kesesuaiannya.

$$\%PSPPT = \frac{(A + B)}{C} \times 100\%$$

% PSPPT adalah persentase produk yang mendapatkan SPPT SNI dan/ atau Sertifikat Kesesuaian. A adalah produk yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang baru. B adalah produk SNI Wajib dan SNI Sukarela yang mempertahankan sertifikat. C adalah jumlah produk kelautan dan perikanan yang dinilai kesesuaiannya. Pada periode triwulan I tahun 2025, capaian nilai A sejumlah 8 (delapan produk), capaian nilai B sejumlah 2 (dua) produk, sedangkan jumlah C sesuai dengan target rincian output (RO) kegiatan yaitu 162 produk.

Tabel 4. Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)	6	-	-	70	6,17	-	-	6,17	102,83	8,81	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, capaian persentase produk yang mendapatkan sertifikat SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian adalah 6,17%. Capaian ini setara dengan 102,83% terhadap target triwulan I tahun 2025 yakni 6%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 70%, maka capaian triwulan I tahun 2025 telah mencapai 8,81%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat

dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya maupun capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja diatas antara lain:

- 1) Evaluasi resertifikasi produk tuna dalam kemasan kaleng merek Frabelle, Isabella, Sinar, Pantai Manado dan Tuna Royale yang diproduksi oleh PT Sinar Pure Foods International tanggal 6-9 Januari 2025.



Gambar 14. Evaluasi resertifikasi produk tuna dalam kemasan kaleng PT Sinar Pure Foods International

- 2) Surveilan produk sarden dan makerel dalam kemasan kaleng dengan merek Aliya, Hoya dan LSC yang diproduksi oleh PT Artha Sumatera Abadi di Medan, Sumatera Utara tanggal 16-17 Januari 2025.



Gambar 15. Surveilan produk sarden dan makerel dalam kemasan kaleng PT Artha Sumatera Abad

- 3) Rapat keputusan sertifikasi tanggal 10 Januari 2025 dan 14 Januari 2025. Rapat ini menghasilkan rekomendasi diantaranya: a) diberikan sertifikat kesesuaian kepada produk pempek merek Dahliaku yang diproduksi oleh UKM Empek-Empek Dahlia, b) diberikan sertifikat kesesuaian kepada produk tuna dalam kemasan kaleng merek Frabelle, Isabella, Sinar, Pantai Manado dan Tuna Royale berdasarkan SNI 8223:2022 yang diproduksi oleh PT Sinar Pure Foods International, dan c) diberikan sertifikat kesesuaian kepada produk abon ikan krustasea atau moluska merek Aroma Food yang diproduksi oleh CV Aroma.



Gambar 16. Rapat keputusan sertifikasi

- 4) Pemeliharaan sistem manajemen mutu LSPPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 dengan dilaksanakannya rapat koordinasi persiapan kegiatan Tim

Kerja Penilaian Kesesuaian Produk KP tahun 2025 dan rapat pembahasan inovasi layanan digital lingkup BBP3KP.

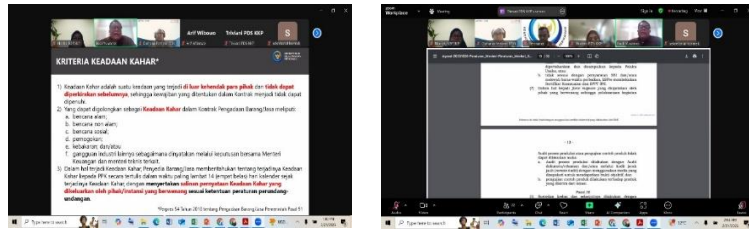


Gambar 17. Rapat koordinasi persiapan kegiatan Tim Kerja Penilaian Kesesuaian Produk KP tahun 2025



Gambar 18. Rapat pembahasan inovasi layanan digital lingkup BBP3KP

- 5) Kaji ulang permohonan untuk PT Mata Gunung Althazor untuk produk tuna dalam kemasan kaleng dengan merek Kita Laut, PT Interfood Sukses Jasindo untuk produk sarden dan makerel dalam kemasan kaleng dengan merek Moga, PT Rezeki Inti Artha untuk produk tuna dalam kemasan kaleng dengan merek Wilmond, serta resertifikasi PT Samudera Mandiri Sentosa untuk produk tuna dalam kemasan kaleng dengan merek SMS.
- 6) Koordinasi terkait sertifikasi ulang/resertifikasi terhadap beberapa klien LSPro-HP untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat kesesuaian berakhir.
- 7) Persiapan penyelenggaraan kegiatan seri webinar: SNI Produk Perikanan “SNI didapat, UMKM Hebat”.
- 8) Koordinasi kegiatan Tim Kerja Penilaian Kesesuaian Produk KP tahun 2025, serta terbitnya amandemen lampiran sertifikat akreditasi LSPr-040-IDN dari KAN tanggal 21 Februari 2025 dengan 15 pemutakhiran ruang lingkup dan 2 penambahan ruang lingkup baru.
- 9) Rapat pembahasan inovasi layanan sertifikasi SNI produk wajib dan sukarela tanggal 7 dan 19 Februari 2025 yang dilaksanakan secara daring dengan pihak PT Pesat Aghni Solusi selaku penyedia jasa.
- 10) Rapat koordinasi dengan Direktur Pengolahan terkait surat dari Kepala BBP3KP nomor B.216/BBP3KP/PDS.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Surveilans Sertifikasi SNI Wajib.



Gambar 19. Kegiatan rapat pembahasan survailen wajib

- 11) Evaluasi sertifikasi untuk produk sarden dan makerel dalam kemasan kaleng merek MOGA untuk PT Interfood Sukses Jasindo yang diproduksi oleh Fujian Xingguang Foods Co., Ltd dilaksanakan tanggal 17-21 Maret 2025.



Gambar 20. produk sarden dan makerel

- 12) Kaji ulang permohonan dilakukan terhadap permohonan sertifikasi dari beberapa pemohon, diantaranya PT Mata Gunung Altazor, PT Indo Warna Perkasa, CV Buana Citra Sentosa dan PT Samudera Mandiri Sentosa.
- 13) Rapat keputusan sertifikasi tanggal 13 Maret 2025 dan 25 Maret 2025. Rapat ini menghasilkan rekomendasi diberikan sertifikat kesesuaian kepada UKM Iwa-Qu untuk produk abon ikan merek Iwa-Qu dan PT Interfood Sukses Jasindo untuk produk sarden dan makerel dalam kemasan kaleng merk MOGA diproduksi oleh Fujian Xingguang Foods Co., Ltd.



Gambar 21. Rapat tinjauan hasil evaluasi sertifikasi

- 14) Penyelenggaraan seri webinar bertajuk SNI Didapat, UMKM Hebat tanggal 5 Maret 2025. Webinar ini dihadiri oleh 1.340 peserta dari berbagai kalangan, termasuk instansi pemerintah, akademisi, penyuluh perikanan, serta pelaku usaha. Dalam webinar ini, tiga orang narasumber utama menyampaikan materi terkait penerapan SNI produk perikanan.



Gambar 22. Pelaksanaan Seri Webinar bertajuk SNI Didapat, UMKM Hebat di BBP3KP

- 15) Sosialisasi terkait implementasi Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) tanggal 25 Maret 2025.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase produk yang mendapatkan sertifikat SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian sebesar Rp250.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp4.600.720.000,- atau setara dengan 1,84%.

IK 3. Persentase Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis (Persen)

Standar minimal mutu dan keamanan bahan pangan selalu berkembang mengikuti tuntutan konsumen. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan masalah gizi, manfaat bahan pangan, dan keamanan pangan bagi kesehatan manusia. Bahan pangan dengan kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan memenuhi standar keamanan lebih diminati oleh konsumen. Keamanan pangan sangat tergantung pada pelaku industri dalam mengolah bahan pangan serta peran (kebijakan) pemerintah yang dapat memberi jaminan keamanan pada produk pangan. Salah satu peran pemerintah yang dapat memberi jaminan keamanan produk pangan adalah dengan standardisasi.

Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh Komite Teknis. Komite Teknis melaksanakan kaji ulang minimal 1 kali dalam lima tahun setelah SNI ditetapkan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI. Hasil kaji ulang dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan terhadap SNI.

BBP3KP sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bertugas melakukan penyiapan bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan adalah jumlah bahan RSNI produk pangan dan metode uji produk kelautan dan

perikanan yang siap dibahas pada rapat teknis dengan Komite Teknis di Ditjen PDSPKP (Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan dan Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Non Pangan).

Tahun 2025, BBP3KP akan melakukan penyusunan 7 (tujuh) bahan RSNI antara lain (1) Revisi SNI 8646:2018 Kerupuk ikan, udang dan moluska Siap Makan; (2) Revisi SNI 7661:2019 Pempek; (3) Revisi SNI 7530:2018 Tuna Loin Segar; (4) Revisi SNI 4104:2015 Tuna Loin Beku; (5) Revisi SNI 7761:2013 Dodol Rumput Laut; (6) Revisi SNI 7689: 2013 Agar-agar Kertas dan (7) Revisi SNI 2346:2015 Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan.

$$\%RSNI = \frac{\sum A}{\sum B} \times 100\%$$

%RSNI adalah persentase bahan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis (%). $\sum A$ adalah jumlah capaian tahapan proses pada bahan rancangan SNI hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan kepada Komite Teknis. $\sum B$ adalah jumlah tahapan proses pada bahan rancangan SNI hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi seluruh tahapan penyusunan rancangan SNI.

Pada periode triwulan I tahun 2025, nilai $\sum A$ yaitu 1 (satu) dengan tahapan proses RSNI0 pada 4 (empat) judul bahan RSNI diantaranya (1) Revisi SNI 8646:2018 Kerupuk ikan, udang dan moluska Siap Makan, (2) Revisi SNI 7661:2019 Pempek, (3) Revisi SNI 7689: 2013 Agar-agar Kertas dan (4) Revisi SNI 2346:2015 Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan. Nilai $\sum B$ yaitu 4 (empat) yang merupakan jumlah seluruh tahapan penyusunan rancangan SNI meliputi RSNI0, RSNI1, RSNI2 dan RSNI3.

Tabel 5. Pencapaian indikator persentase bahan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis (Persen)	25	-	-	100	25	-	-	25	100	25	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, capaian persentase bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis adalah 25%. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan I tahun 2025 yakni 25%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 25%, maka capaian triwulan I tahun 2025 telah mencapai 25%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya maupun capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Pengumpulan data dan informasi bahan RSNi dan Kegiatan Penyusunan bahan RSNi0 yang terdiri dari 7 judul yaitu: a) Revisi SNI 8646:2018 Kerupuk ikan, udang dan moluska Siap Makan dengan konseptor Tabroni dan Gud Elyna Kurnia, b) Revisi SNI 7661:2019 Pempek dengan konseptor Surti Kanti dan Dwi Fajar Riyanti, c) Revisi SNI 7530:2018 Tuna Loin Segar dengan konseptor Rachmat Fadillah dan Gt. Adi Nirwansyah, d) Revisi SNI 4104:2015 Tuna Loin Beku dengan konseptor Dhias Wicaksono dan Irfan Syahbana, e) Revisi SNI 7761:2013 Dodol Rumput Laut dengan konseptor Arlina Maya Sari dan Lynda kurnia Lisdiani, f) Revisi SNI 7689: 2013 Agar-agar Kertas dengan konseptor Siti Mardiana dan Endang Trimurti, dan g) Revisi SNI 2346:2015 Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan dengan konseptor Rini Rosita dan Dede R Adawiyah.

- 2) Rapat *refreshment* bagi konseptor dan editor RSNI produk perikanan tanggal 11 Februari 2025 melalui aplikasi *zoom meeting*.



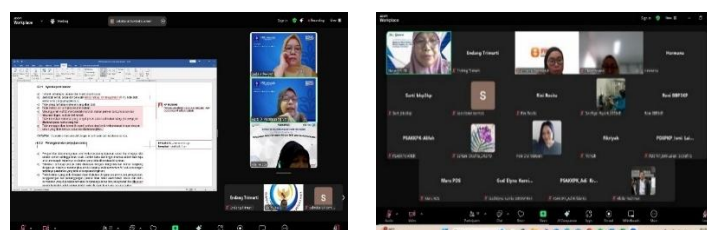
Gambar 23. Kegiatan Refreshment bagi Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan

- 3) Rapat penyiapan bahan RSNI tanggal 20 Februari 2025 secara hybrid melalui aplikasi *zoom meeting* dan RR Surimi BBP3KP. Pada kegiatan ini konseptor menyampaikan draf RSNI0 yang telah disusun.



Gambar 24. Kegiatan penyiapan Bahan RSNI

- 4) Rapat penyusunan konsep RSNI1 produk perikanan TA 2025 tanggal 26 - 27 Februari 2024 secara daring.



Gambar 25. Kegiatan penyusunan konsep RSNI Produk Perikanan

- 5) Pengiriman sampel agar-agar kertas yang terdiri dari 4 sampel dengan merk lingkaran organik, agar-agar cap Apel, agar-agar cap Bintang Melon, dan agar-agar cap Mangga Dua Putra. Sampel dimasukkan ke Laboratorium BBP3KP untuk diuji parameter kadar air.



Gambar 26. Dokumentasi sampel agar-agar kertas

- 6) Pengiriman surat permintaan data dan informasi pengujian terkait hasil pengujian produk: 1) Kerupuk ikan udang dan moluska Siap Makan; 2) Pempek; 3) Dodol

Rumput Laut; 4) Tuna Loin Segar; 5) Tuna Loin Beku; dan 6) Agar-agar Kertas produk ke Unit Layanan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah.

- 7) pengumpulan data primer dan sekunder dari pengujian sampel produk, basis data laboratorium BBP3KP, dan berbagai macam sumber literatur, yang dapat dipergunakan oleh konseptor untuk dijadikan referensi tambahan dalam proses penyusunan RSNI.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase bahan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis sebesar Rp122.153.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp959.489,- atau setara dengan 0,79%.

IK 4. Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Kegiatan diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan ditujukan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi hasil uji terap berupa ragam produk/alat/mesin/desain layout maupun pengujian dan sertifikasi produk kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi penyusunan media informasi sebagai bahan/peraga dan penyebaran informasi hasil uji terap dan pengujian hasil perikanan.

Penyusunan media informasi merupakan kegiatan pembuatan dan pencetakan media informasi. Bahan penyusunan media informasi tersebut merupakan hasil-hasil inovasi/perekayasaan alat dan mesin, pengujian dan sertifikasi produk. Tujuan pembuatan media informasi adalah sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan hasil inovasi/perekayasaan alat dan mesin, pengujian dan sertifikasi produk yang telah dilakukan oleh BBP3KP kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usaha perikanan dengan harapan dapat diketahui, diadopsi dan diterapkan.

Penyebarluasan informasi hasil uji terap dan pengujian hasil perikanan terdiri dari kegiatan pameran, bazar, bimbingan teknis, webinar, demonstrasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan, merupakan upaya untuk memperkenalkan atau mempromosikan hasil-hasil inovasi/perekayasaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh BBP3KP kepada masyarakat luas. Demonstrasi produk kelautan dan perikanan merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung/praktek tentang tata cara pembuatan produk hasil perikanan, yang dipandu oleh instruktur atau narasumber yang kompeten di

bidangnya melalui kegiatan pameran, bazar, bimbingan teknis, webinar dengan target peserta/pengunjung. Peserta/pengunjung penerima informasi pada kegiatan penyebarluasan informasi hasil uji terap dan pengujian hasil perikanan yang mengisi kuesioner IKM merupakan parameter pengukuran yang memenuhi keberhasilan pada indikator kinerja diatas.

Orang yang menerima diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan adalah orang yang mendapatkan informasi sehingga timbul kesadaran, menerima dan pada akhirnya memanfaatkannya melalui:

- a. Mengikuti bimbingan penerapan pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah;
- b. Menggunakan layanan pengujian mutu produk
- c. Menggunakan jasa LsPro KP;
- d. Menggunakan layanan cold Storage;
- e. Menggunakan jasa sewa peralatan pengolahan;
- f. Menggunakan layanan Perpustakaan;
- g. Melaksanakan praktek kerja lapang/magang/penelitian; dan
- h. Melakukan *re-cook* olahan BBP3KP.

$$\%PLMD = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%PLMD adalah persentase penerima layanan dan/atau manfaat dari kegiatan diseminasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan. A adalah jumlah orang yang memanfaatkan pelayanan dan jasa BBP3KP. B adalah jumlah orang yang menerima diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan. Pada periode triwulan I tahun 2025, capaian nilai A sejumlah 80 (delapan puluh) orang, capaian nilai B sejumlah 1.000 (seribu) orang.

Penyebarluasan informasi kepada dilakukan kepada 330 (tiga ratus tiga puluh) orang dengan hasil jumlah orang yang memanfaatkan pelayanan dan jasa BBP3KP sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang disajikan pada Lampiran 5. Capaian tersebut didukung oleh 2 (dua) rencana aksi berupa penyusunan 32 (tiga puluh dua) bahan informasi berupa konten media sosial dan website PPID BBP3KP, serta 4 (empat) event penyebarluasan informasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tabel 6. Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	8	-	-	25	8	-	-	8	100	32	-	-

Pada triwulan I tahun 2025, capaian persentase penerima layanan dan/atau manfaat dari kegiatan diseminasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan adalah 8%. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target triwulan I tahun 2025 yakni 8%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 25%, maka capaian triwulan I tahun 2025 telah mencapai 32%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya maupun capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Peliputan dan penyusunan konten media sosial terkait pelatihan fillet ikan nila dan lele tanggal 14 Januari 2025 di Workshop BBP3KP.



Gambar 27. Peliputan dan konten media sosial terkait pelatihan fillet ikan nila dan lele

- 2) Peliputan dan penyusunan konten media sosial terkait workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi mie dan kue glundung fortifikasi HPI tanggal 23 Januari 2025 di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 28. Peliputan dan penyusunan konten media sosial terkait workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi mie dan kue glundung fortifikasi HPI

- 3) Konten media sosial yang telah dipublikasikan akun BBP3KP selama periode Januari 2025 tercatat sebanyak 41 (empat puluh satu) konten yang terdiri dari 11 (sebelas) konten disusun secara mandiri serta 30 (tiga puluh) konten kolaborasi dan repost.
- 4) Penyebarluasan informasi melalui Bazar Produk Perikanan dan Kuliner bulan Januari 2025 tanggal 9-10 Januari 2025 di Area Parkir GMB III KKP Jakarta.



Gambar 29. Penyebarluasan informasi pada bazar produk perikanan dan kuliner bulan Januari

- 5) Menerima dan menjawab sebanyak 13 (tiga belas) pengaduan berupa pertanyaan masyarakat melalui email bbp3kp@kkp.go.id dan *direct message* media sosial (Instagram) pada periode Januari.
- 6) Pengambilan gambar menu ramadhan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 19, 24, 25, dan 27 Februari 2025 dengan membuat konten video olahan makanan dan minuman berbahan dasar ikan dan rumput laut, diantaranya: a) Gohyong Ikan, b) Es Kopyor Rumput Laut, c) Dimsum Ikan, d) Fish chips, e) Stick Ikan, f) Es Cendol Rumput Laut, g) Es Lumut Rumput Laut, h) Samosa ikan, i) Takoyaki, j) Es Krim Rumput Laut, k) Fish Cone, l) Siomay Ikan, m) Otak-otak ikan, n) Boba Rumput Laut, dan o) Kue Garpu.
- 7) Pengambilan gambar Pilot Test Enzim Protase Hidrolisat Protein Ikan (HPI), konten menu ramadhan berbahan baku ikan tilapia, dan pendampingan webinar

diversifikasi produk gohyong tuna bekerjasama dengan Direktorat Pengolahan tanggal 21-28 Februari 2025.



Gambar 30. Pengambilan gambar konten menu ramadhan berbahan dasar ikan dan rumput laut, tilapia, dan pilot test enzim protease Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

- 8) Penyusunan 10 (sepuluh) konten media sosial pada periode Februari.



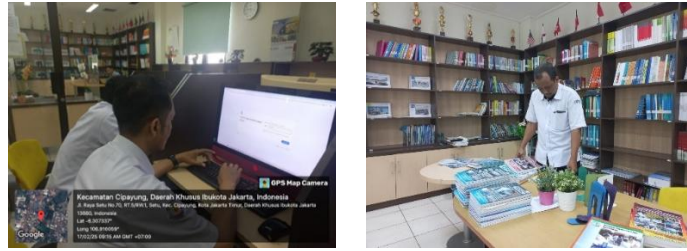
Gambar 31. Contoh konten media sosial

- 9) Konten media sosial yang telah dipublikasikan akun BBP3KP selama periode Februari 2025 tercatat sebanyak 51 (lima puluh satu) konten yang terdiri dari 10 (sepuluh) yang disusun secara mandiri serta 41 (empat puluh satu) konten kolaborasi dan repost.
- 10) Penyebarluasan informasi melalui Bazar Produk Perikanan dan Kuliner bulan Februari 2025 tanggal 7 Februari 2025 di Area Parkir GMB III KKP Jakarta.



Gambar 32. Penyebarluasan informasi pada bazar produk perikanan dan kuliner bulan Februari

- 11) Menerima dan menjawab sebanyak 10 (sepuluh) pengaduan berupa pertanyaan masyarakat melalui email bbp3kp@kkp.go.id dan *direct message* media sosial (Instagram) pada periode Februari.
- 12) Menyediakan bahan bacaan/ pustaka yang dapat diakses langsung ke Perpustakaan Kantor BBP3KP dengan jumlah pengunjung periode Februari sebanyak 9 pengunjung.



Gambar 33. Kegiatan tim pengelola perpustakaan BBP3KP

- 13) Peliputan atau pengambilan gambar dalam rangka penyusunan bahan informasi dilaksanakan pada kegiatan Webinar Series SNI Produk Perikanan: SNI Didapat, UMKM Hebat” tanggal 5 Maret 2025, Kampanye Protein Ikan tanggal 17 Maret 2025 di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Bogor, dan video ucapan Idul Fitri di BBP3KP Jakarta.



Gambar 34. Peliputan atau pengambilan gambar dalam rangka penyusunan bahan informasi

- 14) Penyusunan bahan informasi untuk konten media sosial sebanyak 12 (dua belas) konten media sosial pada periode Maret.



Gambar 35. Contoh Konten Media Sosial Maret 2025

- 15) Konten media sosial yang telah dipublikasikan akun BBP3KP selama periode Maret 2025 tercatat sebanyak 44 (empat puluh empat) konten yang terdiri dari 12 (dua belas) yang disusun secara mandiri serta 32 (tiga puluh dua) konten kolaborasi dan *repost*.
- 16) Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Webinar Series SNI Produk Perikanan: SNI Didapat, UMKM Hebat”.



Gambar 36. Webinar Series SNI Produk Perikanan: “SNI Didapat, UMKM Hebat”

- 17) Penyebarluasan informasi melalui Safari Ramadhan dalam rangka Kampanye Protein Ikan tanggal 17 Maret 2025 di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Ciseeng, Bogor.



Gambar 37. Penyebarluasan Informasi melalui Kampanye Protein Ikan di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Ciseeng, Bogor

- 18) Penyebarluasan informasi melalui penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi pengunjung/penerima informasi pada media digital (LED Banner) yang ditampilkan di Lobi Kantor BBP3KP.



Gambar 38. Tampilan SKM Digital pada LED Banner

- 19) Menerima dan menjawab sebanyak 8 (delapan) pengaduan berupa pertanyaan masyarakat melalui email bbp3kp@kkp.go.id dan *direct message* media sosial (Instagram) pada periode Maret.
- 20) Menyediakan bahan bacaan/ pustaka kurang lebih 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) judul buku dengan jumlah buku lebih dari 1.800 (seribu delapan ratus) yang dapat diakses langsung ke Perpustakaan Kantor BBP3KP dengan jumlah pengunjung periode Maret sebanyak 21 pengunjung.



Gambar 39. Kegiatan tim pengelola perpustakaan BBP3KP

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase penerima layanan dan/atau manfaat dari kegiatan diseminasi pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan sebesar Rp300.000.000,- sampai dengan

periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp13.375.053,- atau setara dengan 4,46%.

IK 5. Persentase Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diujiterapkan (Persen)

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha bidang kelautan dan perikanan dalam mendorong nilai tambah produk kelautan dan perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha dan masyarakat. Ruang lingkup pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran kepada koperasi dan pelaku usaha mikro kecil difokuskan pada isu strategis dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaku usaha mikro kecil dan koperasi yang mendapatkan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran antara lain dilakukan melalui (a) perbaikan dalam proses produksi, (b) perbaikan mutu produk, (c) diversifikasi produk bernilai tambah, (d) pengadopsian teknologi, (e) uji penerimaan dan perluasan pasar, dan (f) uji preferensi konsumen. Indikator keberhasilan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran meliputi (a) terpenuhinya perbaikan dalam proses produksi, (b) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, (c) terpenuhinya mutu produk sesuai persyaratan, dan (d) meningkatnya keberterimaan pasar.

Kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan
 - Pembentukan tim pelaksana kegiatan
 - Pengumpulan data dan informasi
- b. Penentuan teknik pengolahan dan pemasaran
 - Identifikasi dan penyusunan daftar usulan
 - Penentuan teknik pengolahan dan pemasaran
- c. Penetapan pelaku usaha
 - Penyusunan daftar pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan
 - Penentuan terhadap calon pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
 - Penetapan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan
- d. Penetapan jenis fasilitasi pendampingan
- e. Pelaksanaan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran

Monitoring pendampingan, evaluasi pendampingan dan pelaporan

Persentase produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang diuji terapkan adalah persentase dari jumlah produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang telah diterapkan oleh pelaku usaha dibanding jumlah transfer teknologi produk kelautan dan perikanan bernilai tambah hasil pengembangan BBP3KP kepada pelaku usaha.

Produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang telah diterapkan oleh pelaku usaha adalah produk hasil transfer teknologi yang telah diproduksi dan/atau dipasarkan kepada konsumen oleh pelaku usaha.

Transfer teknologi produk kelautan dan perikanan bernilai tambah hasil pengembangan BBP3KP kepada pelaku usaha adalah bimbingan penerapan teknologi dengan menyesuaikan perkembangan industri dan kebutuhan pasar kepada pelaku usaha melalui diversifikasi/inovasi produk dan/atau perbaikan dalam proses produksi.

Ruang lingkup uji terap pengembangan produk kelautan dan perikanan antara lain meliputi:

1. Workshop teknik pengolahan dan pemasaran dalam rangka pengembangan produk kelautan dan perikanan;
2. Bimbingan penerapan pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah;
3. Pengujian mutu produk; dan
4. Uji penerimaan pasar/ preferensi konsumen.

Tabel 7. Pencapaian indikator persentase produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang diujiterapkan (Persen)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diujiterapkan (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang diujiterapkan ditargetkan sebesar 100%. Indikator kinerja tersebut diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan II, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan II.

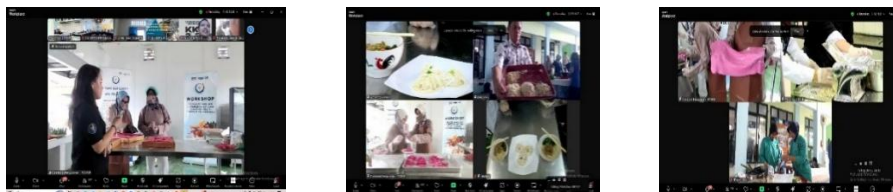
Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Penyusunan SK Tim Kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- 2) Penyampaian surat usulan Calon Peserta Penerap Pengembangan Produk KP Bernilai Tambah kepada 6 Dinas KP Kab/Kota antara lain Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Provinsi Jakarta; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor; Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor; Dinas Perikanan Kab. Bekasi; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Terdapat 71 UMKM yang telah mendaftar sebagai calon peserta penerap pengembangan produk KP bernilai tambah.
- 3) Sosialisasi kegiatan pendampingan penerapan pengembangan produk KP yang diselenggarakan secara hybrid daring dan luring di BBP3KP tanggal 17 Januari 2025.



Gambar 40. Sosialisasi kegiatan pendampingan penerapan pengembangan produk kelautan dan perikanan

- 4) Workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan dengan materi mie HPI dan kue glundung HPI khas Pekalongan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan PDSPKP dan BBP3KP tanggal 23 Januari 2025 di Workshop BBP3KP dan unit pengolahan HPI di Pekalongan.



Gambar 41. Workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk perikanan

- 5) Rapat persiapan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah tahun 2025 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di GMB lantai 13 KKP.



Gambar 42. Rapat persiapan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah tahun 2025

- 6) Melaksanakan seleksi administrasi calon peserta Penerap Pengembangan Produk KP Bernilai Tambah hasil usulan Dinas KP.
- 7) Melaksanakan verifikasi data, penilaian komitmen dan rencana pengembangan produk yang diusulkan oleh UMKM calon peserta pendampingan penerapan pengembangan produk KP melalui wawancara secara online yang dilaksanakan tanggal 13 Februari 2025. Adapun Rangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan yaitu:
- Kegiatan dibuka oleh Dr. Adi Wibowo, S.Pi, M.Si (Ketua timja UTTPP)
 - Kegiatan Verifikasi dilakukan dg cara wawancara secara on line, pengecekan kesesuaian data 34 UMKM dengan form pendaftaran, serta dokumen surat pernyataan.
 - Calon peserta berasal dari 6 kab/kota meliputi Kab. Adm.Kepulauan Seribu, Kota Depok, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kab. Bekasi, dan Tangerang Selatan.



Gambar 43. Verifikasi data, penilaian komitmen dan rencana pengembangan produk UMKM calon peserta Pendampingan Penerapan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025

- 8) Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang dilaksanakan pada bulan Februari adalah Pilot Test Enzim Protease Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang merupakan kegiatan bersama dengan Direktorat Pengolahan PDSPKP, BBP3KP dan PT. Brentag.



Gambar 44. Kegiatan Pilot Test Enzim Protease Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

- 9) Pelatihan diversifikasi produk olahan ikan tanggal 12 Februari 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dan BBP3KP bertindak sebagai narasumber dengan materi pengolahan yaitu Mantao ikan dan Fish Chips yang dihadiri 30 peserta dari ibu-ibu penggerak PKK di wilayah Kota Bogor.



Gambar 45. Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

- 10) Narasumber pada kegiatan "Promosi Kuliner Ikan Hias Daerah Kalimantan Selatan" yang diselenggarakan oleh Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di anjungan Kalimantan Selatan TMII tanggal 15 Februari 2025.



Gambar 46. Promosi Kuliner Ikan Hias Daerah Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan

- 11) Kegiatan pelatihan diversifikasi pelatihan olahan HKP yg dilaksanakan di Aula Ds. Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi tanggal 21 Februari 2025. Materi pelatihan adalah gohyong ikan tuna dan sirup rumput laut yang diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari TP PKK Kec Cibitung / Ds. Cibuntu & Kader posyandu Desa Cibuntu, Kec Cibitung.



Gambar 47. Pelatihan Diversifikasi Pelatihan Olahan Hasil Kelautan Perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bekasi

- 12) Rapat pilot test enzim protease pengolahan HPI yang bertempat di ruang rapat Batari, BBP3KP tanggal 17 Februari 2025. Rapat diselenggarakan oleh tim kerja diversifikasi dan nilai tambah Direktorat Pengolahan.



Gambar 48. Rapat Pilot Test Enzim Protease Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

- 13) Pengolahan produk perikanan untuk konten media sosial, diantaranya ikan krispi bumbu teriyaki, tuna bumbu sate, sirup rumput laut, gohyong ikan, dimsum ikan, es kopyor rumput laut, kue garpu, boba rumput laut, siomay, otak-otak, es krim rumput laut, samosa, takoyaki, fish cone, fish chips, stik ikan, cendol rumput laut dan es lumut rumput laut.



Gambar 49. Pengolahan produk perikanan untuk konten media sosial bekerjasama dengan Tim Humas PDSPKP dengan tema “Peluang usaha bisnis produk KP di bulan Ramadhan”

- 14) Penilaian komitmen dan rencana pengembangan produk hasil verifikasi data (hasil wawancara kepada calon peserta pendampingan penerapan pengembangan produk KP) yang telah dilaksanakan guna penetapan peserta pendampingan penerapan pengembangan produk KP tahun 2025.
- 15) Penetapan 12 UMKM yang akan diusulkan menjadi penerap PPNT Tahun 2025.
- 16) Mempersiapkan rencana kegiatan workshop teknik pengolahan dan pemasaran dalam rangka pendampingan penerapan pengembangan produk KP tahun 2025
- 17) Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah berupa Pilot Test Enzim Protease Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) yang merupakan kegiatan bersama dengan Direktorat Pengolahan PDSPKP, BBP3KP dan PT. Brentag.



Gambar 50. Kegiatan Pilot Test Enzim Protease Pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI)

- 18) Penerimaan kunjungan ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia) tanggal 12 Maret 2025 sebagai bentuk kegiatan kerjasama teknologi pengolahan dan pemasaran.



Gambar 51. Kunjungan ASPRINDO ke BBP3KP

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diujiterapkan sebesar Rp300.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp10.694.152,- atau setara dengan 3,56%.

IK 6. Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar (Persen)

Fasilitasi inkubasi bisnis pengembangan usaha dilakukan oleh BBP3KP sebagai bentuk pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan. Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan atau yang disingkat Inbis Invapro-KP adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*). Kegiatan inkubasi bisnis ini didukung oleh Perpres No.27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha, dan Peraturan Direktorat Jenderal PDSPKP No. 26 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro-KP).

Pada tahun 2025, BBP3KP menargetkan 9 (sembilan) UMKM pengolah produk pangan yang mendapat fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha, yang terdiri dari 6 (enam) UMKM yang dibina di BBP3KP Setu dan 3 (tiga) UMKM yang dibina di Satuan Kerja BBP3KP. Pelaksanaan kegiatan Inbis Invapro-KP terdiri dari tahapan pra Inkubasi, Inkubasi dan pasca Inkubasi. Pada tahap Inkubasi dilaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada Tenant oleh Tim Inbis Invapro-KP BBP3KP dengan melibatkan tenaga ahli, Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan. Tahap inkubasi diatas berupa:

- 1) Bimbingan teknis pengembangan usaha
 - a. Workshop pembekalan program Inbis Invapro-KP
 - b. Bimbingan teknis diversifikasi produk
- 2) Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha
 - a. Pendampingan pengembangan produk
 - b. Pendampingan penerapan jaminan mutu
 - c. Pendampingan manajemen usaha dan keuangan (*action plan, business model canvas*, pembukuan, dan analisa usaha)
 - d. Fasilitasi perizinan berusaha dan sertifikasi (NIB, P-IRT, SKP, HACCP, SNI, MD, Halal)
 - e. Fasilitasi pengembangan desain dan kemasan berupa pembiayaan desain, bahan dan label kemasan produk, dan pencantuman informasi nilai gizi

- f. Fasilitas promosi dan pemasaran
- 3) Monitoring dan Evaluasi

Tabel 8. Pencapaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase produk kelautan dan perikanan bernilai tambah yang diujiterapkan ditargetkan sebesar 100%. Indikator kinerja tersebut diukur dengan periode triwulanan yang targetnya dimulai pada triwulan II, sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada triwulan II.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan baik berupa pendampingan maupun fasilitasi kepada 9 (sembilan) tenant yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran 2025.
- 2) Menyusun Tim Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari perwakilan dari Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP.
- 3) Melakukan seleksi administrasi calon tenant Inbis Invapro KP tahun 2025, dari sejumlah 38 tenant yang mendaftar untuk dibina terdapat 26 tenant yang memenuhi persyaratan administrasi. Tenant yang lolos seleksi administrasi tersebut selanjutnya dinilai performanya dan mendapatkan hasil penilaian sebanyak 26 tenant sesuai kriteria.
- 4) Penilaian komitmen terhadap calon tenant inbis Invapro KP. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Inbis Invapro KP. Dari 26 UMKM yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan nilai performa, terdapat 9 UMKM yang memiliki komitmen tertinggi untuk ditetapkan sebagai tenant Inbis Invapro KP. Selanjutnya akan disampaikan surat pemberitahuan penetapan kepada tenant dan Dinas KP Pembina melalui surat penetapan kepala BBP3KP.

- 5) Profiling kebutuhan pendampingan bagi 14 mitra UMKM Satker BBP3KP Palabuhanratu pengolahan produk kelautan dan perikanan tanggal 20 Januari 2025.



Gambar 52. Profiling kebutuhan pendampingan bagi 14 mitra UMKM Satker BBP3KP Palabuhanratu

- 6) Pendampingan UMKM Mina Terampil tanggal 15 Januari 2025 oleh Satker BBP3KP Ambon.



Gambar 53. Pendampingan UMKM Mina Terampil

- 7) Pendampingan pengembangan usaha UMKM Sari Rasa tanggal 16 Januari 2025 oleh Satker BBP3KP Ambon.



Gambar 54. Pendampingan pengembangan usaha UMKM Sari Rasa

- 8) Kunjungan Poklaksar Nusa Telu dan Poklaksar Mahina Hena Lima dalam rangka perbaikan peforma produk UKM tanggal 17 Januari 2025 di Satker BBP3KP Ambon.



Gambar 55. Kunjungan Poklaksar Nusa Telu dan Poklaksar Mahina Hena Lima

- 9) Fasilitasi label dan bahan promosi UMKM Kaisar Arkarna tanggal 20 Januari 2025 oleh Satker BBP3KP Ambon.



Gambar 56. Fasilitas label dan bahan promosi UMKM Kaisar Arkarna

- 10) Identifikasi UMKM Poklaksar Mahina Solemata di Negri Tial Kabupaten Maluku Tengah tanggal 20 Januari 2025.



Gambar 57. Identifikasi UMKM Poklaksar Mahina Solemata

- 11) Penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Modelling Usaha Tenant Inkubasi Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan.
- 12) Pembuatan petunjuk teknis modelling usaha tenant inkubasi inovasi produk kelautan dan perikanan.
- 13) Pengumpulan data yang diperlukan untuk pembuatan model usaha khusus untuk produk olahan berupa bakso ikan, abon cakalang, abon lele, abon tuna, siomay/dimsum, pempek, nugget, keripik kulit ikan.
- 14) Satker BBP3KP Mataram menjadi narasumber pada kegiatan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi pilus ikan nila yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan secara daring melalui zoom meeting tanggal 13 Februari 2025. Selain itu juga dilaksanakan Praktek Pengolahan Pilus Ikan Nila oleh Tim Ditjen PDSPKP (Satker BBP3KP Mataram).



Gambar 58. Workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi pilus ikan nila

- 15) Satker BBP3KP Mataram menjadi narasumber pada kegiatan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi gohyong ikan tuna tanggal 27 Februari 2025 Narasumber pada kegiatan

Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan secara daring melalui zoommeeting.



Gambar 59. workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi gohyong ikan tuna

- 16) Fasilitasi dokumen perizinan UMKM Dua Karunia yang merupakan mitra Satker BBPK3P Palabuhanratu tahun 2025 berupa pembuatan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko.



Gambar 60. Fasilitasi dokumen perizinan UMKM Dua Karunia

- 17) Kolaborasi uji kompetensi keahlian SMK Bhayangkara dengan Satker BBPK3P Palabuhanratu sebagai penguji yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2025.



Gambar 61. Kolaborasi Satker BBPK3P Palabuhanratu dengan SMK Bhayangkara

- 18) Diversifikasi produk olahan berbahan dasar ikan kepada PAUD TPA Doa Bangsa tanggal 25 Februari 2025, dengan jumlah peserta yang ikut melakukan kegiatan pengolahan berjumlah 20 orang anak, 8 orang guru, dan 8 orang pendamping/orang tua murid.



Gambar 62. Diversifikasi produk olahan berbahan dasar ikan kepada PAUD TPA Doa Bangsa

- 19) Identifikasi dan verifikasi bagi UMKM yang belum memiliki perijinan seperti UMKM Mutiara Laut yang belum memiliki P-IRT, Penambahan KBLI, Halal, Desain Kemasan di Desa Laha, Kota Ambon tanggal 6 Februari 2025.



Gambar 63. Identifikasi dan verifikasi perizinan UMKM Mutiara Laut

- 20) Identifikasi dan verifikasi produk abon Kelompok Usaha Koperasi Ina Mandiri yang belum memiliki PIRT dan sertifikat Halal tanggal 07 Februari 2025.



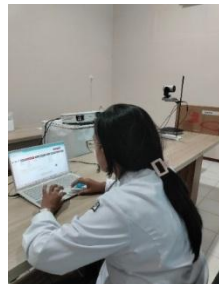
Gambar 64. Identifikasi dan verifikasi produk abon Kelompok Usaha Koperasi Ina Mandiri

- 21) Identifikasi 2 (dua) kelompok usaha yang ada di Desa Morela yakni Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyun tanggal 21 Februari 2025. Tindak lanjut fasilitasi berupa pembuatan email kelompok, NIB, Label dan PIRT, serta akan terus melakukan pendampingan dan pelatihan pembuatan produk-produk diversifikasi yang akan diproduksi oleh kedua Poklahsar ini.



Gambar 65. Identifikasi Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyun

- 22) Fasilitasi legalitas NIB Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyung di Desa Morella. Sebagai langkah awal pendampingan, tanggal 24 Februari 2025 Satker BBP3KP Ambon membantu dalam memfasilitasi pengajuan NIB pada OSS.



Gambar 66. Fasilitas legalitas NIB Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyung

- 23) Koordinasi dengan Poklahsar Mina Terampil terkait pendampingan pemasaran produk sambal ikan asap ke beberapa swalayan tanggal 25 Februari 2025.



Gambar 67. Koordinasi dengan Poklahsar Mina Terampil

- 24) Rapat persiapan pelaksanaan webinar pengolahan produk perikanan mengikuti standar SNI tanggal 14 Maret 2025 secara daring. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam rencana pelaksanaan webinar sebagai berikut.

Tabel 9. Rencana substansi webinar

No.	Materi	Substansi
1	Demo	Pembuatan produk /alternatif di tampilkan pada saat CCP
2	Standar mutu	Tahapan Proses, bahan-bahan yang digunakan dan hal - hal yang kadangkala terlewat dan CCP nya
3	Faktor utama perbaikan produk	Contoh dan penyebab kegagalan
4	Analisa usaha	Margin usaha/ HPP Pangsa pasar Strategi pemasaran Metode pemasaran Analisa kegagalan
5	Testimoni	Pelaku usaha BBP3KP ber SNI • Script untuk disampaikan • Profil usaha • Pengalaman perbaikan produk sebelum dilakukan perbaikan produk dan setelah dilakukan perbaikan produk; • Hasil sebelum dan sesudah perbaikan.

- 25) Pelaksanaan rapat optimalisasi pemanfaatan cold storage 1000 ton tanggal 25 Maret 2025 terkait layanan publik, persyaratan dan prosedur penggunaan layanan, serta pengenaan tarif layanan.
- 26) Satker BBP3KP Mataram ikut serta dalam kegiatan Workshop “Ngolah Ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa” yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan.



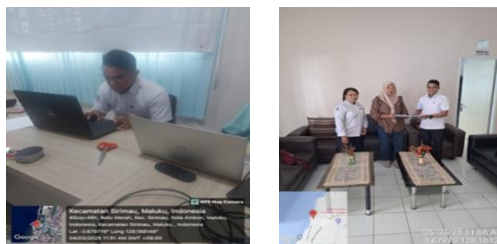
Gambar 68. Workshop “Ngolah Ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa”

- 27) Satker BBP3KP Palabuhanratu survei lokasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan (Bapak Sakti Wahyu Trenggono) yang dilaksanakan pada pondok pesantren Modern Assalam Putri tanggal 12-13 Maret 2025.



Gambar 69. Survei lokasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Safari Ramadhan Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan

- 28) Satker BBP3KP Ambon fasilitasi penertiban P-IRT bagi Poklaksar Mutiara Laut tanggal 04 Maret 2025.



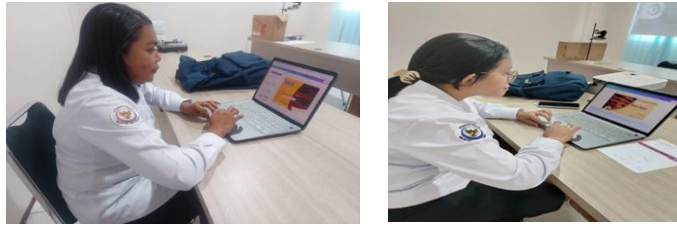
Gambar 70. Fasilitasi penertiban P-IRT bagi Poklaksar Mutiara Laut

- 29) Fasilitasi UMKM Sari Rasa dan UMKM Bunda Aska berupa Papan Nama Rumah Produksi yang di design oleh Satker BBP3KP Ambon.



Gambar 71. Fasilitasi bahan promosi kepada UMKM Sari Rasa dan UMKM Bunda Aska

- 30) Fasilitasi pembuatan label sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) untuk Poklaksar Harapan Star dan Putri Duyung yang berlokasi di Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 10 Maret 2025.



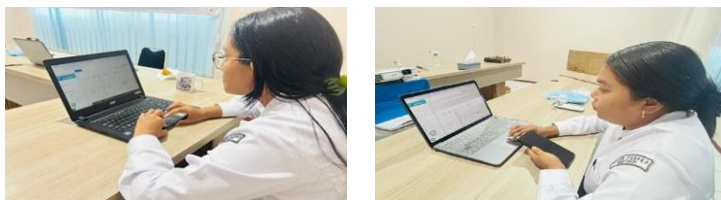
Gambar 72. Fasilitasi pembuatan label untuk Poklahsar Harapan Star dan Putri Duyun

- 31) Satker BBP3KP Ambon memenuhi undangan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D) Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Kamari Hotel Ambon tanggal 13 Maret 2025.



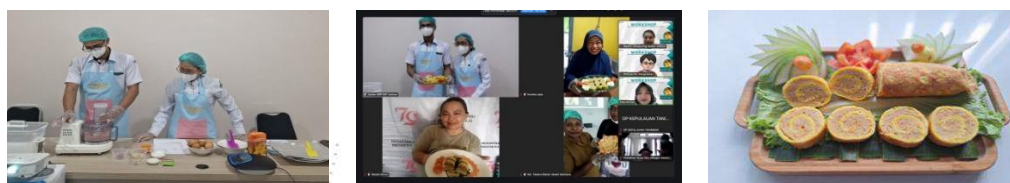
Gambar 73. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah

- 32) Satker BBP3KP Ambon fasilitasi NIB dan SPP-PIRT untuk produk ikan asap Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyung. Masa berlaku SPPIRT selama 5 tahun sampai dengan 17 Maret 2030.



Gambar 74. Fasilitasi NIB dan SPP-PIRT untuk produk ikan asap Poklahsar Harapan Star dan Poklahsar Putri Duyung

- 33) Workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi rolade tuna tanggal 18 Maret 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan. Satker BBP3KP Ambon diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber. Peserta yang hadir berjumlah 478 peserta secara daring maupun laman youtube yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Pelaku Usaha Perikanan, Penyuluh perikanan, UMKM Terkurasi.



Gambar 75. Workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk rolade tuna

- 34) Fasilitasi pembuatan label sebagai salah satu prasyarat dalam pengajuan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) untuk UMKM IASI yang berlokasi di Desa Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.



Gambar 76. Fasilitasi pembuatan label UMKM IASI

- 35) Satker BBP3KP Ambon mengunjungi Poklaksar Cumi di Desa Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon dalam rangka identifikasi UMKM atau kelompok baru tanggal 20 Maret 2025.



Gambar 77. Identifikasi UMKM baru, Poklaksar Cumi

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar sebesar Rp3.503.223.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp6.565.000,- atau setara dengan 0,19%.

3.2.2

Sasaran Kegiatan 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP (Persen)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BBP3KP merupakan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BBP3KP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit kerja BBP3KP.

Sejak akhir tahun 2019, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan melalui aplikasi SIDAK KKP. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang tuntas ditindaklanjuti oleh BBP3KP}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BBP3KP}} \times 100$$

Tabel 10. Pencapaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP

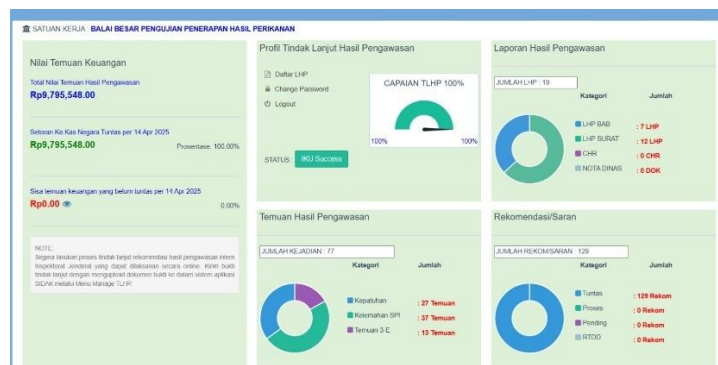
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP (Persen)	95	80	80	95	100	100	100	100	105,26	105,26	0	0

Pada triwulan I tahun 2025, capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan BBP3KP adalah 100%. Capaian

ini setara dengan 105,26% terhadap target triwulan I tahun 2025 yakni 95%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 95%, maka capaian triwulan I tahun 2025 telah mencapai 105,26%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yaitu 100% maka capaian ini tidak mengalami peningkatan, begitu pula jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada periode sebelumnya yaitu 100% maka capaian ini tidak mengalami peningkatan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Pejabat pembuat komitmen (PPK) bersurat kepada CV Solusi Arya Prima untuk melengkapi kekurangan kartu garansi seluruh alat hasil pengadaan dan melakukan *running test muffle furnace magmatherm* MTP-1100-40-B2. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, kartu garansi telah dikirimkan. Selain itu, sudah dilakukan *running test muffle furnace magmatherm* MTP-1100-40-B2 disertai bukti surat tugas dari PT Solusi Arya Prima nomor ST/1054/SAP/XI/2024 kepada PT Deltasindo Global Scientifxc sebagai distributor resmi produk Magmatherm.



- 2) Berdasarkan aplikasi SIDAK KKP, dari 19 LHP terdapat 77 temuan dengan 129 rekomendasi. Dari 129 rekomendasi tersebut, semuanya dinyatakan tuntas.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan BBP3KP sebesar Rp50.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 belum terdapat realisasi.

IK 8. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan BBP3KP (Persen)

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BBP3KP adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi lingkup BBP3KP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan

realisasi anggaran lingkup BBP3KP tahun 2024. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK BBP3KP tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran BBP3KP tahun 2024}} \times 100\%$$

Tabel 11. Pencapaian Indikator persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan BBP3KP (Persen)	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-

Persentase penyelesaian temuan BPK-RI di lingkungan BBP3KP ditargetkan sebesar 100%. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2025 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban secara berkala.
- 2) Rekonsiliasi dan revidi atas laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) Satker lingkup Ditjen PDSPKP semester II Tahun 2024 (Unaudited) di Kota Bogor tanggal 14 - 17 Januari 2025.
- 3) Melaksanakan revidi laporan hasil pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat UAPA KKP tanggal 20-22 Januari 2025.
- 4) Kegiatan penyusunan usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN tahun 2024 dan penyusunan penggunaan BMN 2025 di lingkup Ditjen PDSPKP.
- 5) Tim BMN BBP3KP melaksanakan lelang terhadap 5 unit kendaraan roda 4 dengan hasil lelang terjual semua tanggal 20 Maret 2025.
- 6) Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan BMN dalam rangka persiapan lelang peralatan dan mesin tanggal 24 - 27 Maret 2025.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan BBP3KP sebesar Rp100.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp4.008.500,-.

IK 9. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan BBP3KP (Nilai)

WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah sebutan atau predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan.

Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang ada pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai menuju WBK adalah:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- d. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Pada Tahun 2025, Tim Pelaksana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBP3KP yang dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Tim Nomor B.19BBP3KP/KP.440/I/2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya pemenuhan kriteria penilaian Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai BBP3KP. Dalam memperkuat pengawasan, BBP3KP juga membentuk tim penanganan pengaduan, tim unit penanganan gratifikasi, dan tim penanganan benturan kepentingan.

Tabel 12. Pencapaian indikator nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	-	75	-	75	-	83.71	-	-	-	-	-	-

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BBP3KP ditargetkan sebesar 75. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2025 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

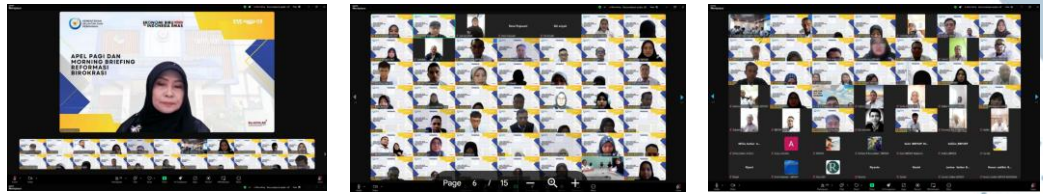
Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Pengesahan surat penugasan tim pelaksana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) BBP3KP tahun 2025 tertanggal 02 Januari 2025.
- 2) Pelaksanaan *morning briefing* reformasi birokrasi lingkup BBP3KP tanggal 13 Januari 2025.



Gambar 78. Pelaksanaan *morning briefing* reformasi birokrasi bulan Januari

- 3) Pelaksanaan *morning briefing* reformasi birokrasi lingkup BBP3KP tanggal 10 Februari 2025.



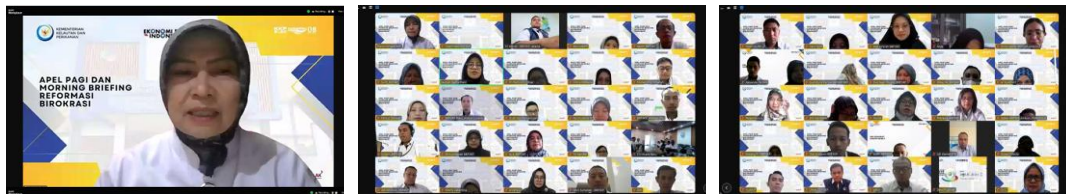
Gambar 79. Pelaksanaan *morning briefing* reformasi birokrasi bulan Februari

- 4) Pelaksanaan rapat PZI WBK/WBBM tanggal 14 Februari 2025 di RR Surimi BBP3KP.



Gambar 80. Rapat PZI WBK/WBBM

- 5) Pelaksanaan *morning briefing* reformasi birokrasi lingkup BBP3KP tanggal 10 Maret 2025.



Gambar 81. Pelaksanaan *morning briefing* reformasi birokrasi bulan Maret

- 6) Pemenuhan rencana kerja serta bukti dukung seluruh area dari bulan Januari hingga Maret 2025.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BBP3KP sebesar Rp82.671.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp7.747.500,-.

IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BBP3KP (Nilai)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,

maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Nilai PM SAKIP BBP3KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BBP3KP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BBP3KP.

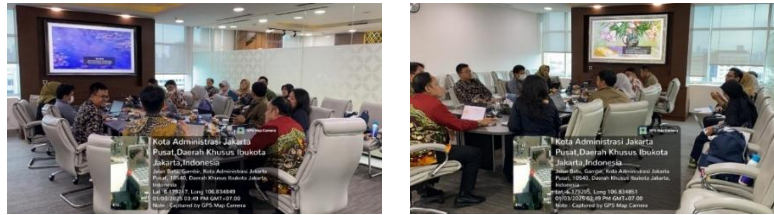
Tabel 13. Pencapaian indikator nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	-	84	-	86	-	85,5	-	-	-	-	-	-

Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP ditargetkan sebesar 86. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2025 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

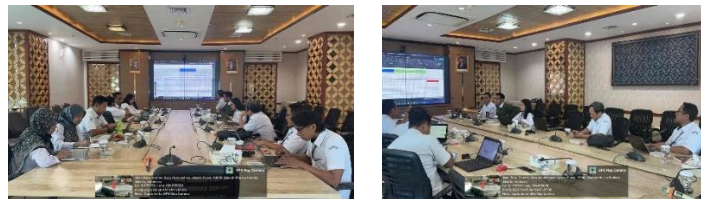
Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Pembahasan dokumen perencanaan kinerja Level 1 dan Level 2 tanggal 3 Januari 2025 di RR Karaginan GMB 3.



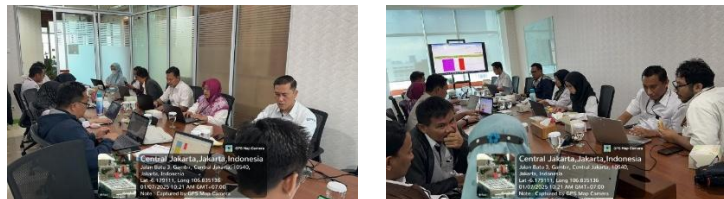
Gambar 82. Pembahasan dokumen perencanaan kinerja

- 2) Rapat pengisian evaluasi rencana aksi level 2 periode triwulan IV tahun 2024 tanggal 6 Januari 2025 di RR Branding GMB 3.



Gambar 83. Rapat pengisian evaluasi rencana aksi level 2 periode triwulan IV tahun 2024

- 3) Pengisian evaluasi rencana aksi level 1 periode triwulan IV tahun 2024 tanggal 7 Januari 2025 di RR. Sekretariat Ditjen PDSPKP, GMB III.



Gambar 84. Pengisian evaluasi rencana aksi level 1 periode triwulan IV tahun 2024

- 4) Pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun 2024 dan penginputan capaian kinerja pada Sistem Pengelolaan Kinerja tanggal 8 Januari 2025 di RR. Sekretariat Ditjen PDSPKP, GMB III.



Gambar 85. Pengukuran capaian kinerja lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun 2024

- 5) Penyusunan draft LKj level 2 periode triwulan IV tahun 2024 tanggal 9 Januari 2025 di RR. Sekretariat Ditjen PDSPKP, GMB III.



Gambar 86. Penyusunan draft lkj level 2 periode triwulan IV tahun 2024

- 6) Pembahasan matriks cascading kinerja Ditjen PDSPKP 2025-2029 dan pembahasan indikator kinerja level II dan indikator kinerja manajerial dukungan manajemen lingkup Ditjen PDSPKP 2025 tanggal 21 Januari 2025 di RR Sekretariat Ditjen PDSPKP GMB 3.



Gambar 87. Pembahasan matriks cascading kinerja Ditjen PDSPKP 2025-2029

- 7) Rekonsiliasi data capaian dan pelaporan kinerja tahun 2024 tanggal 5 Februari 2025 di RR Setditjen PDSPKP GMB 3.



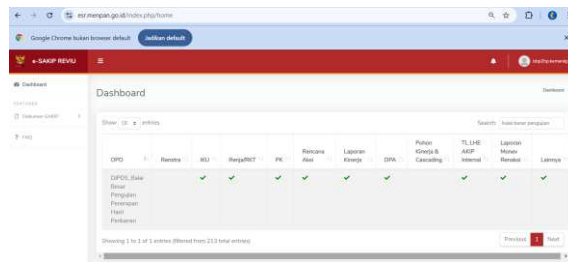
Gambar 88. Rekonsiliasi Data Capaian dan Pelaporan Kinerja Tahun 2024

- 8) Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2024 Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP di Ruang Rapat Sekretariat GMB 3 tanggal 11 Februari 2025.



Gambar 89. Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2024 Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP

- 9) Melakukan pengunggahan dokumen yang dibutuhkan pada eSakup reviu MenpanRB (esr.menpan.go.id).



Gambar 90. Esakip Reviu MenpanRB

- 10) Penginputan perencanaan kinerja tahun anggaran 2025 lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada aplikasi SAPK tanggal 12 Maret 2025 di RR Setditjen PDSPKP GMB 3.



Gambar 91. Penginputan perencanaan kinerja pada aplikasi SAPK

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP sebesar Rp150.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp5.365.000,- atau setara dengan 3,58%.

IK 11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu:

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, dan pagu minus);

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran (data kontrak, pengelolaan UP/TUP, LPJ bendahara, dan dispensasi SPM);
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran (penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, dan retur SP2D); dan
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA (kesalahan SPM, dan perencanaan kas).

Pada Tahun 2025 terdapat reformulasi IKPA sebagai berikut :



Gambar 92. Reformulasi IKPA 2025

Langkah-langkah yang akan ditempuh guna meningkatkan capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran BBP3KP, antara lain:

- a. Pada aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran:
 - melakukan revisi DIPA secara selektif dengan perbaikan kualitas perencanaan anggaran;
 - memastikan pelaksanaan anggaran berjalan baik dengan cara menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran;
 - melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan;
 - mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- b. Pada aspek kepatuhan atas regulasi:

- meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data supplier dan data kontrak. Data kontrak disampaikan ke KPPN tepat waktu (paling lambat 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani/tanggal kontrak);
- meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP;
- meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara. (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya);
- meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian SPM terutama pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM.

c. Pada aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan:

- meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan daftar rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D;
- mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan;
- memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai. SPM LS Kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan).

d. Pada aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan:

- meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran;
- meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.

Tabel 14. Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	-	93,76	-	92	-	96,1	-	-	-	-	-	-

Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP ditargetkan sebesar 92. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2025 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Menyusun laporan bulanan kelompok keuangan.
- 2) Mengajukan usulan gaji induk, uang makan, dan tunjangan kinerja pegawai BBP3KP.
- 3) Mengajukan usulan honorarium PNPJ Januari sampai dengan Maret 2025.
- 4) Melakukan revisi RKAKL POK 1, dengan tanggal terbit 17 Januari 2025.
- 5) Melakukan revisi RKAKL DIPA 1, dengan tanggal terbit 30 Januari 2025.
- 6) Melakukan revisi RKAKL DIPA 2, dengan tanggal terbit 21 Februari 2025.
- 7) Melakukan revisi RKAKL DIPA 3, dengan tanggal terbit 04 Maret 2025.
- 8) Melakukan revisi RKAKL POK 2, dengan tanggal terbit 17 Januari 2025.
- 9) Menyusun LPJ Bendahara bulan April sampai dengan Juni 2024.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan BBP3KP sebesar Rp125.037.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp5.556.000,- atau setara dengan 4,44%,-.

IK 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan Kinerja Perencanaan Anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Variabel efisiensi dengan uraian capaian indikator RO memiliki bobot 75%. Variabel efisiensi yang terdiri atas 2 (dua) uraian yaitu nilai efisiensi Satker dengan bobot 10% dan efisiensi SBK dengan bobot 15%. Kategori capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: a) Sangat Baik, apabila NKA > 90, b) Baik, apabila NKA >80 – 90, c) Cukup, apabila NKA >60 – 80, d) Kurang, apabila NKA >50 – 60, dan e) Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Tabel 15. Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	-	71	-	71,5	-	100	-	-	-	-	-	-

Nilai kinerja perencanaan anggaran di lingkungan BBP3KP ditargetkan sebesar 71,5. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2025 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan BBP3KP pada triwulan I dalam upaya mendukung capaian Indikator Kinerja di atas yaitu penginputan capaian output melalui aplikasi SAKTI yang saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi Monev Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan, serta terus melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian output yang telah diinput.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian nilai kinerja perencanaan anggaran di lingkungan BBP3KP sebesar Rp200.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp4.234.000,- atau setara dengan 2,12%.

IK 13. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BBP3KP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi

merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/ workshop/ magang/ kursus.

Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Bobot komponen penilaian IP ASN dapat dilihat pada Gambar 93.



Gambar 93. Komponen Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP

Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP. Pada tahun 2025, indikator kinerja di atas diukur dengan periode semesteran, berdasarkan pemantauan pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id/>.

Tabel 16. Pencapaian indikator indeks profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BBP3KP (Indeks)	-	87	-	87	-	88,74	-	-	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP ditargetkan sebesar 87. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya

belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2025 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Melaksanakan pembahasan terkait standar penampilan pegawai di lingkungan Ditjen PDSPKP tanggal 15 Januari 2025.
- 2) Pembahasan penyelarasan JF bidang PDS di GMB tanggal 22 Januari 2025.
- 3) Perumusan penyelarasan JF Bidang PDS (JF Analis Pasar Hasil Perikanan, JF Pembina Mutu Hasil KP dan JF Asisten Pembina Mutu Hasil KP) tanggal 6 Februari 2025 di GMB III KKP.
- 4) Pelantikan dan pengambilan sumpah / janji Jabatan Fungsional atas nama Sdri. Ratu Milla tanggal 11 Maret 2025 di GMB III KKP.



Gambar 94. Pelantikan dan pengambilan sumpah / janji Jabatan Fungsional

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP sebesar Rp132.292.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp3.242.000,- atau setara dengan 2,45%.

IK 14. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)

Berdasarkan **Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021**, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

KRITERIA INOVASI

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Khusus

Terdapat dua aspek penilaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP yaitu aspek penilaian kelompok umum dan aspek penilaian kelompok khusus. Aspek penilaian kelompok umum terdiri atas: (a) ringkasan (5%); (b) ide inovatif (20%); (c) signifikansi (25%); (d) kontribusi terhadap capaian TPB (5%); (e) adaptabilitas (20%); (f) keberlanjutan (20%); dan (g) kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus terdiri atas: (a) pembaruan / peningkatan Inovasi (25%); (b) adaptabilitas (20%); (c) penguatan keberlanjutan (25%) dan (d) evaluasi (30%). Formula pengukuran indikator kinerja ini yaitu Eselon II yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I, dengan target hasil yaitu proposal inovasi unit kerja level II yang ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilaian Eselon I.

Formula pengukuran indikator ini yaitu inovasi pelayanan publik Eselon II yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I. Target hasil proposal inovasi unit kerja level II yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilaian Eselon I.

Tabel 17. Pencapaian indikator inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja BBP3KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja BBP3KP ditargetkan sebesar 1 inovasi. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2025 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah:

- 1) Melaksanakan rapat pembahasan IKU inovasi pelayanan publik tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 di RR. Karaginan Lantai 14 Gedung Mina Bahari III KKP.



Gambar 95. rapat pembahasan IKU inovasi pelayanan publik

- 2) Persiapan penetapan judul proposal inovasi yang akan diajukan BBP3KP tahun 2025.

BBP3KP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja BBP3KP sebesar Rp10.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 belum terdapat realisasi.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBP3KP pada Tahun 2025 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBP3KP Nomor: DIPA-032.06.2.427686/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu Rp42.613.397.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sementara pagu terblokir sebesar Rp12.077.393.000,00.

Realisasi Anggaran BBP3KP per Rincian Output Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 18. Realisasi Anggaran BBP3KP per Output Kegiatan

Kegiatan	Output	Pagu Awal	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
5279. Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	5279.ADA.001 Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP	122.153.000	959.489	121.193.511	0,79
	5279.ADA.002 Produk Kelautan dan Perikanan yang Dinilai Kesesuaiannya	250.000.000	4.600.720	245.399.280	1,84
	5279.ADA.003 Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji	525.000.000	48.455.060	476.544.940	9,23
	5279.AEF.001 Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	300.000.000	13.375.053	286.624.947	4,46
	5279.DDA.001 Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah yang Diterapkan	300.000.000	10.694.152	289.305.848	3,56
	5279.QDG.001 UMKM Kelautan Perikanan yang Difasilitasi dalam Inkubasi Bisnis	450.000.000	6.565.000	443.435.000	1,46
	5279.QDH.001 Badan Usaha yang Difasilitasi Kemitraan Penyimpanan Produk	360.979.000	0	360.979.000	0
	5279.RAL.001 Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.991.944.000	0	1.991.944.000	0
	5279.RBQ.001 Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0
	2361.EBA.962 Layanan Umum	300.000.000	16.545.500	283.454.500	5,52
	2361.EBA.994 Layanan Perkantoran	36.463.321.000	6.357.886.777	30.105.434.223	17,44
	2361.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	200.000.000	4.234.000	195.766.000	2,12
	2361.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	150.000.000	5.365.000	144.635.000	3,58
	2361.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	200.000.000	4.008.500	195.991.500	2
JUMLAH		42.613.397.000	6.472.689.251	36.140.707.749	15,19

Pada triwulan I tahun 2025, penyerapan anggaran BBP3KP adalah Rp6.472.689.251,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh dua enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau setara dengan 15,19% terhadap total pagu anggaran awal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja periode triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja BBP3KP, telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai target indikator kinerja.

Secara umum, indikator kinerja BBP3KP yang dapat dihitung pada periode triwulan I tahun 2025 telah tercapai $\geq 100\%$. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 105,49%.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum, realisasi seluruh indikator kegiatan dengan periode triwulan I tahun 2025 telah tercapai. Adapun permasalahan yang dihadapi selama triwulan I serta rekomendasinya sebagai berikut:

Tabel 19. Permasalahan dan rekomendasi periode triwulan I tahun 2025

No.		Permasalahan Triwulan I	Rekomendasi
1.		Kebijakan efisiensi anggaran	
	a.	Penyebarluasan informasi melalui tatap muka langsung tidak dapat dilaksanakan (mobil ATI)	Penyebarluasan informasi dilaksanakan secara daring melalui kegiatan webinar atau media sosial
	b.	Keterbatasan dalam pelaksanaan transfer teknologi pengolahan secara langsung ke pelaku UMKM	Wilayah kerja kegiatan dibatasi hanya Kab./Kota di Jabodetabek atau dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting
2.		Sarana Prasarana	
	a.	Keterbatasan media reagensia maka fasilitasi pengujian terhadap produk dari klien SNI sukarela tidak dapat diberikan	Penyampaian surat kepada klien SNI sukarela bahwa fasilitasi evaluasi dan survailen tetap dapat diberikan namun biaya pengujian produk dibebankan kepada pemohon

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja BBP3KP triwulan I tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Lampiran 1. Salinan PK Level 2 BBP3KP Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130, JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500032
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Trisna Ningsih**
 Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Budi Sulistyo**
 Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
 Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistyo

Pihak Kesatu
 Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
 Produk Kelautan dan Perikanan



Trisna Ningsih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Pengujian	1 Persentase Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian (Persen)	70
		2 Persentase Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)	70
		3 Persentase Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis (Persen)	100
		4 Persentase Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	25
		5 Persentase Produk Kelautan dan Perikanan Bermilai Tambah yang Diujiterapkan (Persen)	100
		6 Persentase Pelaku Usaha Tenant Inbis yang Mencapai Peningkatan Pasar (Persen)	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan BBP3KP (Persen)	95
		8 Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan BBP3KP (Persen)	100
		9 Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75

	(WBK) di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	
10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	86
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	92
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan BBP3KP (Nilai)	71,5
13	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan BBP3KP (Indeks)	87
14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja BBP3KP (Inovasi)	1

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	5.300.076.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	37.313.321.000
Total Anggaran Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	42.613.397.000

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua
 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
 Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistyo

Pihak Kesatu
 Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan
 Produk Kelautan dan Perikanan



Trisna Ningsih

Lampiran 2. Produk Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Standar Pengujian

No	Asal Contoh	Contoh No	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk		
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memiliki Persyaratan Mutu
1	PT. Timagro Rafflesia Lestari	1	Lobster laut Utuh Fresh	Timbal (Pb)	1	1		
				Kadmium (Cd)	1			
				ALT	1			
				<i>E. coli</i>	1			
				Salmonella	1			
				<i>V. cholerae</i>	1			
				<i>V. parahaemolyticus</i>	1			
		2	Dori Fillet Frozen	Timbal (Pb)	1	1		
				Kadmium (Cd)	1			
				ALT	1			
				<i>E. coli</i>	1			
2	Direktorat Pengolahan_Gilang	3	Tongkol batik	Histamin	1	1		
		4	Tongkol batik	Histamin	1	1		
		5	Tongkol batik	Histamin	1	1		
3	LSPro HP_Abon Iwaqu	6	Abon ikan patin	ALT	1	1		
		7	Abon ikan patin	ALT	1	1		
		8	Abon ikan patin	ALT	1	1		
		9	Abon ikan patin	ALT	1		1	
		10	Abon ikan patin	ALT	1		1	
4	Siti Asiyah_Timja Pengujian BBP3KP	11	Air	ALT	1	1		
				ALT	1			
				<i>E. coli</i>	1			
				<i>Coliform</i>	1			
5	PT. Samudra Mandiri Sentosa	12	Serpihan tuna dalam minyak 1880 gr	Bobot tuntas	1	1		
				Sensori	1			
				Filth	1			
		13	Serpihan tuna dalam air garam 170 gr	Histamin	1	1		
				Bobot tuntas	1			
				Sensori	1			
				Filth	1			
		14	Ikan tuna dalam air garam 200 gr	Bobot tuntas	1	1		
				Sensori	1			
				Filth	1			
6	Agus Supriyanto	15	Pempek ikan crispy	Kadar air	1		1	
				Kadar abu	1			
				Kadar protein	1			
				Kadar Lemak	1			
				Karbohidrat	1			
7	Timja UTTPP_Mintut	16	Mie	Kadar air	1	1		
				Kadar abu	1			
				Kadar protein	1			
				Kadar Lemak	1			
				Natrium	1			

No	Asal Contoh	Contoh No	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk		
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memiliki Persyaratan Mutu
		17	Kue Glundung Asin	Kadar air	1	1		
				Kadar abu	1			
				Kadar protein	1			
				Kadar Lemak	1			
				Natrium	1	1		
8	LSPro HP_Lucy	18	Abon ikan patin	ALT	1			
9	UKM Citra Snack Bontang	19	Kerupuk ikan siap makan	Kadar abu	1		1	
				Kadar Lemak	1			
10	IKM Tampung Pare	20	Keripik Saluang,	ALT	1	1		
				<i>E. coli</i>	1			
				<i>Salmonella</i>	1			
				<i>S. aureus</i>	1			
				Kapang dan khamir	1			
				Kadar air	1			
				Kadar abu	1			
				Kadar protein	1			
				Kadar Lemak	1			
				Merkuri (Hg)	1			
				Kadmium (Cd)	1			
				Timbal (Pb)	1			
				Timah putih (Sn)	1			
				Arsen total	1			
				Sensori	1			
11	PMEFS	21	Abon ikan gabus	Kadar air	1	1		
				Kadar protein	1			
				Merkuri (Hg)	1			
				Timbal (Pb)	1			
				Kadmium (Cd)	1			
				ALT	1			
				<i>E. coli</i>	1			
				<i>Salmonella</i>	1			
				<i>S. aureus</i>	1			
				Filth	1			
				Sensori	1			
		22	Abon ikan gabus	ALT	1	1		
				<i>E. coli</i>	1			
				<i>Salmonella</i>	1			
				<i>S. aureus</i>	1	1		
		23	Abon ikan gabus	ALT	1			
				<i>E. coli</i>	1			
				<i>Salmonella</i>	1			
				<i>S. aureus</i>	1			
		24	Abon ikan gabus	ALT	1	1		
				<i>E. coli</i>	1			
				<i>Salmonella</i>	1			
				<i>S. aureus</i>	1			
		25	Abon ikan gabus	ALT	1	1		
				<i>E. coli</i>	1			
				<i>Salmonella</i>	1			
				<i>S. aureus</i>	1			
12	Timja UTTPP	26	Rolade	Kadar air	1		1	
				Kadar abu	1			
				Kadar protein	1			
				Kadar Lemak	1			

No	Asal Contoh	Contoh No	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk		
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memiliki Persyaratan Mutu
				Kadar karbohidrat	1			
				Natrium	1			
13	Timja PK Iwaqu	27	Abon ikan	ALT	1	1		
14	Zalfa Univ Sultan Agung Tirtayasa	28	Keripik Jeruju	Kadar air	1		1	
				Kadar abu	1			
				Kadar protein	1			
				Kadar lemak	1			
15	Timja UTTPP	29	Ikan petek segar	Sensori	1	1		
		30	Lumatan daging ikan petek	Kadar air	1	1		
				Kadar abu	1			
				Kadar protein	1			
				Kadar lemak	1			
16	LSPRO-HP PT Mata Gunung Altazor	31	Yellowfin Tuna Solid in Extra Virgin Olive Oil	Histamin	1	1		
				Bobot tuntas	1			
				Filth	1			
				Sensori	1			
		32	Skipjack Tuna Solid in Extra Virgin Olive Oil	Bobot tuntas	1	1		
				Sensori	1			
		33	Skipjack Tuna in Water	Bobot tuntas	1	1		
				Sensori	1			
17	Tim Kerja Pengujian Produk	34	Cangkang Kerang Hijau	Timbal (Pb)	1	1		
		35	Cangkang Kerang Hijau	Timbal (Pb)	1	1		
		36	Cangkang Kerang Hijau	Timbal (Pb)	1	1		
18	Tim Kerja UTTPP (Mintut Silowati)	37	HPI cair Variabel F	Kadar air	1	1		
				Kadar Lemak	1			
				Kadar protein	1			
		38	HPI cair Variabel G	Kadar air	1	1		
				Kadar Lemak	1			
				Kadar protein	1			
19	RSNI_Imung	39	Agar-agar kertas	Kadar air	1	1		
20	PT Deho Canning	40	Skipjack Raw Material	E. coli	1	1		
				Salmonella	1			
				ALT	1			
				Histamin	1			
				Merkuri (Hg)	1			
				Timbal (Pb)	1			
				Kadmium (Cd)	1			
		41	Skipjack Raw Material	E. coli	1	1		
				Salmonella	1			
				ALT	1			
				Histamin	1			
				Merkuri (Hg)	1			
				Timbal (Pb)	1			
				Kadmium (Cd)	1			

No	Asal Contoh	Contoh No	Produk	Parameter Uji	Data	Kesimpulan Produk		
						Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memenuhi Persyaratan Mutu	Tidak Memiliki Persyaratan Mutu
21	Timja UTTPP_Mintut	42	HPI cair (F)_21.1	Sensori	1	1		
		43	HPI cair (G)_21.2	Sensori	1	1		
		44	HPI Liquid Formula Kontrol_21.3	Kadar Lemak	1	1		
				Kadar Protein	1			
				Sensori	1			
		45	HPI Bubuk Formula F Malto 10%_21.4	Kadar Air	1	1		
				Kadar Lemak	1			
				Kadar Protein	1			
				Sensori	1			
		46	HPI Bubuk Formula F Malto 20%_21.5	Kadar Air	1	1		
				Kadar Lemak	1			
				Kadar Protein	1			
				Sensori	1			
		47	HPI Bubuk Formula G Malto 10%_21.6	Kadar Air	1	1		
				Kadar Lemak	1			
				Kadar Protein	1			
				Sensori	1			
		48	HPI Bubuk Formula G Malto 20%_21.7	Kadar Air	1	1		
				Kadar Lemak	1			
				Kadar Protein	1			
				Sensori	1			
		49	HPI Bubuk Formula Kontrol_21.8	Kadar Air	1	1		
				Kadar Lemak	1			
				Kadar Protein	1			
				Sensori	1			
22	Timja PK _Imung	50	Sambal cumi dengan daun kemangi	Kadar protein	1		1	
		51	Sambal ikan asin peda	Kadar protein	1	1		
23	TimJa PK_Imung	52	Agar-agar kertas	Kadar Air	1	1		
		53	Agar-agar kertas	Kadar Air	1	1		
		54	Agar-agar kertas	Kadar Air	1	1		
		55	Agar-agar kertas	Kadar Air	1	1		
24	Devi Yulianti_STP	56	Cangkang Kerang Hijau	Kadmium (Cd)	1	1		
				Timbal (Pb)	1			
		57	Cangkang Kerang Hijau	Kadmium (Cd)	1	1		
				Timbal (Pb)	1			
25	Timja Pengujian (Marry)	59	q	Bobot tuntas	1	1		
		60	q	Bobot tuntas	1	1		
25		60			181	53	7	0
						88,33%		

Lampiran 3. Produk yang Mendapatkan Sertifikat SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian (Persen)

No	Nama Produk	Lokasi	Merek	Nama Klien	Jenis layanan
TW 1					
1	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Frabelle	PT Sinar Pure Foods International	Evaluasi resertifikasi
2	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Isabella	PT Sinar Pure Foods International	Evaluasi resertifikasi
3	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Pantai Manado	PT Sinar Pure Foods International	Evaluasi resertifikasi
4	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Sinar	PT Sinar Pure Foods International	Evaluasi resertifikasi
5	Tuna dalam Kemasan Kaleng	Bitung	Tuna Royale	PT Sinar Pure Foods International	Evaluasi resertifikasi
6	Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng	Medan	Aliya	PT Artha Sumatera Abadi	Surveilan
7	Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng	Medan	TLC	PT Artha Sumatera Abadi	Surveilan
8	Pempek	Bontang	Dahliaku	UKM Empek-Empek Dahlia	Penerbitan sertifikat kesesuaian
9	Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng	Batam	MOGA	PT Interfood Sukses Jasindo	Penerbitan sertifikat kesesuaian
10	Abon Ikan Krustasea atau Moluska	Jambi	Iwa-Qu	UKM Iwa-Qu	Penerbitan sertifikat kesesuaian

Lampiran 4. Judul Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pembahasan bersama Komite Teknis 65-05 pada bulan Februari

No.	Judul Bahan RSNI	Jenis RSNI	Nama Konseptor
1.	Kerupuk Ikan, Udang dan Moluska Siap Makan	Revisi	1. Tabroni 2. Gud Elyna Kurnia
2.	Pempek	Revisi	1. Surti Kanti 2. Dwi Fajar Riyanti
3.	Agar – agar Kertas	Revisi	1. Siti Mardiana 2. Endang Trimurti
4.	Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan	Revisi	1. Dede R Adawiyah 2. Rini Rosita

Lampiran 5. Penerima Layanan dan/atau Manfaat dari Kegiatan Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

No	Klasifikasi Kegiatan	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Penerima Informai/Layanan/ Manfaat (orang)	Jenis Kelamin		Keterangan
					L	P	
1.	Non Event	Pelatihan Fillet Nila dan Lele UPI Kabupaten Cirebon di Workshop BBP3KP Jakarta	14 Januari 2025	16	12	4	Penerima informasi dan layanan/ manfaat
2.	Non Event	<i>Recook</i> kegiatan bimbingan teknis mie dan glundung fortifikasi HPI melalui aplikasi <i>zoom meeting</i>	30 Januari 2025	6	3	3	Penerima informasi dan layanan/ manfaat
3.	Non Event	Layanan Pengujian Lobster Laut Utuh Fresh & Dori Fillet Frozen	Januari 2025	1	1	0	Penerima informasi dan layanan/ manfaat
4.	Non Event	Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan di Kota Bogor	11-12 Februari 2025	40	11	29	Penerima informasi dan layanan/ manfaat
5.	Non Event	Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi "Pilus Ikan"	13 Februari 2025	5	0	5	Penerima informasi dan layanan/ manfaat
6.	Non Event	Pelatihan Diversifikasi Cendol Rumput Laut	12 Maret 2025	7	0	7	Penerima informasi dan layanan/ manfaat
7.	Non Event	Magang SMK PGRI 16 Jakarta	Maret – Mei 2025	5	2	3	Penerima informasi dan layanan/ manfaat
8.	Event	Bazar Produk dan Kuliner KKP Bulan Januari 2025 di Jakarta	12 Januari 2025	73	27	46	Penerima informasi
9.	Event	Bazar Produk dan Kuliner KKP Bulan Februari 2025 di Jakarta	7 Februari 2025	45	9	36	Penerima informasi
10.	Event	Webinar Seri SNI: SNI Didapat, UMKM Hebat	5 Maret 2025	132	50	82	Penerima informasi
11.	Event	Safari Ramadhan dalam rangka Kampanye Protein Ikan di Kabupaten Bogor	17 Maret 2025	0	0	0	Penerima informasi
Total				330	115	215	

BBP3KP

Jl. Raya Setu No. 70, Kel. Setu,
Kec Cipayung, Jakarta Timur, 13880 

021-84997969/ 84998429 Fax: 021-84999360 

<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/> 

bbp3kp 

bbp3kp 

BBP3KP JAKARTA 